

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERKEMBANGAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN
KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN DI UNIT PEMUKIMAN
TRANSMIGRASI IV SP-6 ALUE PEUNYARING
(Analisis Kebijakan Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi Dan
Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia
Nomor : KEP.06/MEN/1999)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**F A I S A L
NIM. 015217883**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
 Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418
 Telp.021.74155050, Fax.021.7415588

Kepada
Yth. Direktur PPs-UT
 Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
 Tangerang 15418

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama / Nim : F A I S A L / 015217883

Judul TAPM : Perkembangan pemukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran di Unit Permukiman Transmigrasi IV Sp.6 Alue Peunyareng (Analisis Kebijakan Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP.06/MEN/1999).

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari Mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai 100% sehingga dinyatakan **Sudah Layak Uji** dalam sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

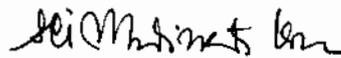
Banda Aceh, 2011

Pembimbing I



DR.SALEH SYAFEL, M.Si
 NIP. 131 835 549

Pembimbing II



SUCI MADIARTI ISMAN, MA, Ph.D
 NIP. 131 671 197

A B S T R A K

Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran Di Unit Permukiman Transmigrasi SP.6 Alue Peunyareng. (Analisis Kebijakan Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambahan Hutan RI Nomor:KEP 06/MEN/1999).

F a i s a l
(faisal_ut@yahoo.co.id)

Kata Kunci :Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan program pembinaan, perkembangan permukiman Transmigrasi dan kesejahteraan transmigran yang dilakukan terhadap transmigran di Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat. Dikaitkan dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan RI Nomor: 06 Tahun 1999, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pemangku kepentingan, selama masa pembinaan dilakukan lebih kurang lima tahun. Setiap transmigran pada tahun pertama-kedua, harus mampu menyesuaikan diri dengan lokasi barunya, kemudian, pada tahun kedua-ketiga, diharapkan transmigran mampu memantapkan dirinya untuk mengelola asset yang ada di lokasi, sedangkan pada tahun keempat-kelima setiap kepala keluarga transmigran telah mandiri serta mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para responden (62,50%) menyatakan **program pembinaan**, terhadap transmigran di Lokasi UPT IV Alue Peunyareng SP6 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran sesuai dengan tahap-tahap pembinaan, termasuk dalam kategori kurang berkembang, nilai indikator (59,33 %), pendapatan transmigran baru mampu menghasilkan 2336 kg setara beras/KK per tahunnya, masih menempati standarisasi pada tingkat **Pemantapan**, belum memenuhi standar yang ditetapkan Kepmentrans dan PPH RI Nomor: 06 Tahun 1999, karena lokasi penelitian sudah dibina lebih lima tahun masuk kategori **Tahap Pengembangan**, seharusnya pendapatan transmigran diatas 3.000 Kg setara beras/KK per tahun.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program pembinaan di lokasi penelitian secara umum belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, lokasi penelitian termasuk dalam kategori kurang berkembang dengan nilai indicator (59,33%), pendapatan transmigran belum mencapai nilai standar diatas 3.000 Kg setara beras per tahun. Hal ini disebabkan karena belum berjalannya fungsi Pembina dan masyarakat itu sendiri, stimulus yang diberikan dan lingkungan, belum sepenuhnya mendukung program. Hasil penelitian ini juga menunjukkan masih terdapat **kendala umum yang dihadapi** adalah lahan yang kurang layak usaha, komoditas dan sarana produksi yang kurang memadai, kelembagaan ekonomi yang kurang berkembang dan kompetensi Pembina yang kurang memadai. Sehingga diperlukan intervensi secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Transmigration Settlements Development and Welfare of Transmigrant in The Transmigration Settlement Units SP.6 Alue Peunyarung. (Policy Analysis Based on Ministerial Decisions Transmigration and Resettlement of Forest Squatters RI Number: KEP 06/MEN/1999).

F a i s a l
(faisal_ut@yahoo.co.id)

Key words: Residential Development and Welfare Transmigrant

This study was conducted to analyze the implementation of coaching programs, development of transmigration settlements and welfare transmigrants committed against migrants in Unit IV Location Alue Peunyarung Kabupaten Aceh Barat. Associated with the Decree of the Minister of Transmigration and Forest Squatter Resettlement RI Number: 06 years 1999, and any constraints faced by stakeholders, during the coaching done approximately five years. Each transmigrants in the first year and second, must be able to adjust to the new location, then, in the second year-third, migrants are expected to be able to establish himself to manage the assets that exist at the site, whereas in the fourth-fifth of each head of family migrants have been independent and able to develop the potential of self and society in the form of active participation in order to develop a sustainable business and life.

This research is uses the qualitative approach. Results of this study showed that respondents (62.50%) stated **program guidance**, to transmigrants in Unit IV Location Alue Peunyarung SP6 has not been fully implemented according to applicable regulations. Development of Settlement and Welfare transmigrans in accordance with the stages of development, including in the category of least developed, the indicator value (59.33%), capable of generating new revenue transmigrants 2336 kg of rice equivalent / household per year, still occupies the standardization at the level of **consolidation**, has not met established standards and PPH Kepmentrans No.: 06 of 1999, as the study site has been nurtured over five years in the category **Stage Development**, revenue should transmigrants over 3000 kg of rice equivalent / household per year.

From this study it can be concluded that the coaching program at the sites is generally not performed in accordance with the terms defined, study sites included in the category of less-developed indicator value (59.33%), the income of migrants has not reached above the standard value of 3000 kg of rice equivalent per year. This is because not yet functioning of Trustees and the community itself, given the stimulus and the environment, not fully support the program. The results of this study also shows there is still a **common problem encountered** is less land worth the effort, commodities and inadequate means of production, economic institutions are poorly developed and inadequate competence coaches. So that the necessary interventions on an ongoing basis.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(T A P M)**

JUDUL TAPM : **PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN DI UNIT
PEMUKIMAN TRANSMIGRASI IV SP 6 ALUE
PEUNYARENG (ANALISIS KEBIJAKAN
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH
HUTAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.06 /
MEN / 1999).**

N A M A : **FAISAL**
N I M : **015217883**
PROGRAM STUDY : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**
HARI/TANGGAL :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. SALEH SYAFEL, M.Si
Nip. 131 835 549

SUCI MADIARTI ISMAN, MA, Ph.D
Nip. 131 671 197

Ketua Bidang SIP

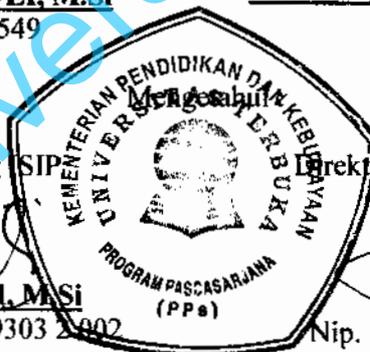
Direktur Program Pasca Sarjana

Dra. SUSANTI, M.Si

Nip. 19671214 199303 2 002

SUCIATI, Ph.D

Nip. 19520213 198503 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JL. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588**

PENGESAHAN

Nama : **F A I S A L**
 NIM : 015217883
 Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul Tesis : **Perkembangan Pemukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi SP-6 Alue Peunyareng (Analisis Kebijakan Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP.06/MEN/1999).**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM), Program Studi Administrasi Publik Program Pasca Sarjana, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 16 Oktober 2011

Waktu : 10.15 – 12.15 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~**

PANITIA PENGUJI TAPM

1. **Ketua Komisi Penguji**

Dr. Sofjan Aripin, M.Si

2. **Penguji Ahli**

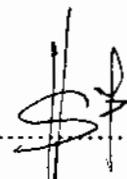
Prof. Dr. A. Aziz Sanafiah, MPA

3. **Pembimbing I**

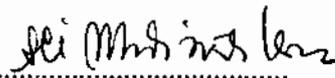
Dr. Saleh Syafei, M.Si

4. **Pembimbing II**

Suci Mardiaty Isman, Ph.D


 :

 :

 :

 :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JL. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418
Telp. 021.74155050, Fax. 021.7415588**

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “**Perkembangan Pemukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi SP.6 Alue Penyareng (Analisis Kebijakan Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP.06/MEN/1999)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi Akademik.

Meulaboh, 2011

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

CA557AAF449086452

5000

DE

FAISAL

NIM. 015217883

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah Nya, penulis telah dapat merampungkan penulisan dan penyusunan tesis sebagai Tugas Akhir Program Pascasarjana (TAPM) pada Universitas terbuka UPBJJ Banda Aceh dengan judul " **Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran Di Unit Pemukiman Transmigrasi SP.6. Alue Penyareng (Analisis Kebijakan Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP. 06/MEN/1999).**..

Tujuan dari penyusunan dan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sederhana bahkan jauh dari kesempurnaan. Hal ini didasari dan diakui semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan daya analisis yang penulis miliki. Namun demikian penulis telah mencoba semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini dengan menerima banyak bantuan, dukungan dari semua pihak baik dalam bentuk moril maupun materiil hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I dan Pembimbing II yang tidak kalah perannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik serta kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof.Ir.Tian Belawati, M.Ed, Ph-D.
2. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat beserta jajarannya yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui perkualihan pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

4. Ketua program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Ketua dan Anggota Tim Penguji yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat yang telah memberikan restu dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan ini.
7. Istri tersayangku beserta anak-anakku tercinta yang telah rela mengizinkan dan memberikan peluang waktu kepada penulis yang tidak lain selaku Suami dan Ayah bagi mereka untuk mengikuti perkuliahan ini hingga terselesaikan tesis ini.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis uraikan namanya satu per satu atas dorongan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga tulisan ini selesai tepat waktu.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan siapa saja yang membutuhkannya.

Atas semua amalan kebajikannya yang telah diberikan tersebut, penulis doakan semoga kelak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah swt.

Meulaboh, 2011

Penulis,


FAISAL

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : KERANGKA TEORITIK	11
A. Kajian Teori	11
1. Perkembangan Transmigrasi d Indonesia.....	11
2. Pembinaan Transmigrasi	14
3. Pengembangan Masyarakat di Permukiman Transmigrasi.....	15
4. Sasaran Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.....	18
5. Analisis Kebijakan	21

B. Kerangka Berfikir.....	22
C. Definisi Operasional.....	29
1. Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran	29
2. Permukiman Transmigrasi	29
3. Transmigrasi.....	29
4. Transmigran	29
5. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.....	30
6. Peningkatan Kesejahteraan Transmigran	30
7. Kebijakan	30
8. Analisis Kebijakan	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Desain Penelitian.....	31
B. Populasi dan Sampel	32
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data	41
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	44
I. TEMUAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Keadaan Sosial Budaya	48
II. PEMBAHASAN	56
A. Program Pembinaan	56
B. Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran	82
C. Kendala yang dihadapi	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	99
1. Simpulan.....	99
2. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR BAGAN

2.1. Bagan pendekatan pengembangan masyarakat 23

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

4. 1 Grafik Gini Ratio UPT IV SP 6 Alue Peunyareng..... 86

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

2.1. Model pembinaan masyarakat transmigran.....	25
2.2. Tahap pembinaan.....	27
4.1. Aksesibilitas lokasi penelitian UPT IV Sp.6 Alue Penyaring.....	43
4.2. Klasifikasi penggunaan lahan di UPT Sp.6 Alue Penyaring.....	46
4.3. Jumlah sekolah menurut jenis pendidikan.....	50
4.4. Sarana kesehatan berdasarkan desa.....	54
4.5. Mata Pencaharian Transmigran	59
4.6. Rerata Tingkat Pendapatan Transmigran	83

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner Responden.
2. Daftar Kuesioner Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran.
3. Indikator dan Parameter Menurut Dimensi Dalam Mendukung Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran.
4. Nilai dan Score indikator semua parameter.
5. Perhitungan Gini Ratio Transmigran UPT Alue Peunyareng SP 6.
6. Peta Permasalahan / Kendala Yang Dihadapi.
7. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman perambah Hutan Nomor : KEP. 06/MEN/ 1999 tanggal 04 Pebruari 1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program transmigrasi sebagai salah satu program pengembangan wilayah, di dalam perjalanannya, secara nyata telah menunjukkan kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah. Pembangunan telah memicu adanya pembentukan desa baru yang berembrikan lokasi transmigrasi. Pembentukan desa baru melalui program transmigrasi diawali dengan pembangunan Unit Pemukiman Transmigrasi sebagai bagian dari wilayah ekonomi. Sebagai satuan wilayah ekonomi, kawasan tersebut dilengkapi dengan infrastruktur, fasilitas sosial ekonomi dan kelembagaan, serta terkait dengan sentra ekonomi disekitarnya dapat terbentuk menjadi pusat pertumbuhan.

Pada dasarnya, tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran. Peningkatan kesejahteraan dimaksudkan bahwa melalui perpindahan untuk bermukim, menetap serta berusaha di daerah baru dengan dukungan fasilitas yang disiapkan melalui program transmigrasi diharapkan dapat mengubah tingkat kehidupannya ke arah yang lebih baik dari pada sebelum berpindah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan transmigrasi melalui pembinaan sumberdaya transmigran agar berkembang dan dapat mandiri mengembangkan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam dan buatan, dalam rangka pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi transmigran maupun penduduk sekitarnya.

Amanat Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, selain menegaskan adanya tujuan pokok penyelenggaraan pembangunan transmigrasi, juga mencantumkan adanya sasaran. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga diharapkan ekonomi dan sosialbudaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya.

Untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian dan integrasi dengan masyarakat sekitar dalam konteks keberhasilan pembangunan transmigrasi, perlu dilakukan pembinaan. Undang-undang nomor 29 tahun 2009 pasal 32 ayat(4) mengatur tentang pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan pemukiman transmigrasi, dalam cakupan bidang: a) ekonomi untuk menuju terciptanya tingkat swasembada; b) sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan alkuturasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitar;

c) mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d) pengembangan kelembagaan pemerintah untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa definitif, dan e) lingkungan permukiman untuk menuju terpeliharanya kelesteraan lingkungan hidup disekitar permukiman transmigrasi.

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan yang merupakan proses akhir dari keseluruhan penyelenggaraan transmigrasi, harus menunjukkan keberhasilan seluruh proses penyelenggaraan transmigrasi. Salah satu dari hasil pelaksanaan program pembinaan adalah terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang memungkinkan potensi transmigran dapat berkembang secara mandiri, terwujudnya masyarakat transmigran produktif, mampu mengatasi masalahnya sendiri dan dapat memenuhi kebutuhannya demi masa depan yang lebih baik. Keberhasilan pelaksanaan pembinaan diukur dengan tercapainya suatu kriteria tertentu, meliputi ekonomi, sosialbudaya, integrasional, keaktifan dan pelayanan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor, KEP 06/MEN/1999, tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran.

Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Penyaring SP 6, merupakan salah satu lokasi penerima transmigran dari beberapa lokasi yang telah ditempatkan warga transmigrasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dan diklasifikasikan sebagai transmigrasi Umum Tanaman Lahan Kering (TULK).

Komoditas yang dikembangkan pada lahan usaha adalah coklat, kelapa sawit, pisang, rambutan, jeruk dan pepaya, sedangkan komoditas tanaman pangan antara lain padi sawah, kacang tanah, kedele, jagung, kacang hijau dan ubi kayu.

Secara administratif, Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Penyaring SP 6 terletak di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh. Penempatan awal dilaksanakan pada bulan Nopember tahun 2004 sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) atau 935 jiwa, terdiri dari masyarakat pengungsi sebanyak 100 KK dan masyarakat dhuafa, pensiunan TNI, dan kombatan GAM, sebanyak 100 KK. Dalam perkembangannya pada saat ini penduduk Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Penyaring SP 6 menjadi 207 Kepala Keluarga atau 931 jiwa, karena adanya kematian, kelahiran dan pecahan kepala keluarga.

Aksesabilitas menuju lokasi ini cukup baik terhadap pusat-pusat pertumbuhan, pusat kesehatan dan pusat pendidikan, jarak dari ibukota Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh) ke lokasi cukup dekat (16 km) dapat ditempuh dalam waktu satu jam, jarak ke puskesmas kecamatan (12 km) namun kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, gorong-gorong dan fasilitas umum dalam keadaan rusak. Aspek pelayanan pendidikan cukup baik dengan tersedianya bangunan sekolah dasar yang representatif, dibangun melalui bantuan UNICEF dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dan didukung tenaga pengajar status PNS sebanyak sepuluh orang, tenaga pengajar berstatus honorer sebanyak enam orang, sementara untuk SMP dan SMA telah tersedia di kota kecamatan.

Hal ini berarti masyarakat UPT IV Alue Penyareng SP6 tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal menuntut ilmu pengetahuan, sedangkan untuk pelayanan kesehatan juga cukup memadai, bangunan Pustu (puskesmas pembantu) cukup baik, di lokasi terdapat satu orang dokter, satu orang paramedis dan satu orang bidan. Disisi lain lembaga ekonomi yang berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang seharusnya dapat mengorganisir ekonomi warga, saat ini belum berkembang dengan baik, hanya bergerak dalam bidang pelayanan simpan pinjam dan waserda karena keterbatasan modal usaha, dilihat dari kondisi perekonomian warga saat ini belum berkembang disebabkan oleh terbatasnya pengusahaan lahan, modal dan peralatan pertanian terbatas sehingga produksi tidak maksimal.

Sebagai upaya dalam rangka pembinaan permukiman transmigrasi, pemerintah telah memberikan berbagai input bantuan sebagai modal dasar transmigran dan membangun berbagai sarana dan prasarana usaha dan permukiman guna menunjang kehidupan transmigran di tempat baru. Berbagai jenis bantuan tersebut sebagian diberikan sejak calon transmigran berada di daerah pengirim sampai transmigran tiba di lokasi transmigrasi dan mendapatkan pembinaan selama-lamanya 5 tahun, sesuai dengan norma masa pembinaan yang telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selama masa pembinaan bantuan-bantuan yang diberikan berupa: (1) informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi; (2) pendidikan dan pelatihan persiapan, perbekalan, dan pelayanan pengangkutan ke lokasi tujuan;

(3) lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik; (4) sarana produksi dan/atau sarana usaha (paket A,B,C); (5) sanitasi dan sarana air bersih; (6) catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapat penghasilan; (7) bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha; serta (8) bimbingan dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan administrasi pemerintah.

Sementara kewajiban transmigran, antara lain menempati rumah yang diberikan, mengolah dan mengelola lahan usahatani, serta memanfaatkan semua bantuan jadup baik beras maupun non beras, saprodi dan saprotan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan/gizi keluarga. Dalam kaitan pemberian bantuan jadup beras oleh Pemerintah didasarkan kepada program pangan untuk kerja (*food for work*). Artinya selama masa pembinaan tersebut transmigran diharapkan mampu menggunakan bantuan beras yang diberikan untuk mengolah dan mengelola lahan usahatannya tanpa harus memikirkan kebutuhan sehari-hari dengan mencari nafkah keluar lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Pembinaan permukiman transmigrasi dilakukan selama lima tahun, dan setelah lima tahun para transmigran diharapkan telah mampu berdiri sendiri dan permukiman transmigrasi dapat berubah menjadi sebuah desa yang mandiri. Ketentuan pembinaan warga transmigran sebagaimana terurai di atas, tidak terkecuali juga berlaku sama untuk Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang hingga kini telah memasuki tahun-tahun akhir pembinaan yakni tahun kelima.

Ini artinya lokasi penelitian sudah masuk tahap pengembangan, dimana transmigran diharapkan telah mampu dan mandiri mengembangkan potensi diri dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan, indikator keberhasilan ditandai dengan penghasilan per KK/ pertahun mampu menerobos hingga 3000 kg setara beras dan selanjutnya lokasi tersebut dapat dijadikan desa defenitif dan pembinaan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam rentang waktu lima tahun pembinaan di Unit Pemukiman Transmigrasi Sp6 Alue Penyareng, berdasarkan pengamatan langsung dilapangan kondisi perekonomian warga sampai saat ini belum berkembang dengan baik disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekad dan kemauan transmigran kurang mendukung, terbatasnya pengusahaan lahan, kurangnya sarana dan prasarana produksi, aksebilitas yang rendah, belum berfungsinya secara optimal lembaga ekonomi dan hasil produksi yang belum optimal, berakibat rendahnya nilai ekonomi yang dihasilkan masyarakat. Hal ini telah mensirnakan harapan suatu wilayah dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan selama ini terasa belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang legal formal yang telah ditetapkan seperti Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP 06/MEN/1999, tanggal 4 february 1999, tentang tingat perkembangan Pemukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigrasi. disamping sumberdaya transmigran dan tenaga pembina yang belum siap.

Bertitik tolak pada uraian di atas, terhadap pelaksanaan pembinaan, perkembangan permukiman dan tingkat kesejahteraan transmigran serta kendala yang dihadapi dalam kurun waktu lebih kurang lima tahun masa pembinaan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi SP6 Alue Penyareng dalam kaitannya dengan Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : Kep.06/MEN/1999, tanggal 4 februari tahun 1999. Maka dirasa perlu dilakukan penelitian untuk melihat Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran. Hal ini dimaksudkan karena kegiatan pembinaan merupakan kegiatan akhir dalam mewujudkan tujuan dan sasaran program transmigrasi dan sekaligus menjadi parameter berhasil tidaknya penyelenggaraan program transmigrasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, dirumuskan tiga masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanan pelaksanaan Program pembinaan sebagaimana yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI Nomor:KEP06/MEN/1999, tentang Tingkat Perkembangan dan Kesejahteraan Transmigran yang dilakukan selama ini oleh pemangku kepentingan terhadap warga transmigran di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Sp-6, sudah mencapai sasaran yang diharapkan.

2. Bagaimana perkembangan permukiman dan tingkat kesejahteraan transmigran selama pembinaan yang dilakukan pemangku kepentingan terhadap warga Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Peunyareng SP-6 dibanding kriteria yang ditentukan ?
3. Kendala apa yang dihadapi selama pelaksanaan program pembinaan dilakukan di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi SP-6 Alue Penyaring.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Pembinaan transmigrasi yang dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan sistem pembinaan transmigrasi berkelanjutan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis tentang pelaksanaan program pembinaan yang telah dilakukan pemangku kepentingan terhadap warga di Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Penyaring SP 6, dalam kaitkan dengan Implementasi Kepmentrans dan PPH Nomor, KEP 06/MEN/ 1999, tentang Tingka Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran.
2. Menganalisis tentang Perkembangan Permukiman dan Tingkat Kesejahteraan Transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Penyaring Sp 6.
3. Menganalisis tentang Kendala yang dihadapi selama program pembinaan dilakukan di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi SP6 Alue Penyaring .

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis.

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi.

2. Kegunaan Pragtis.

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan berbagai pihak dalam membuat/menentukan kebijakan peningkatan perkembangan permukiman dan kesejahteraan transmigran.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi dan sebagai bahan penyempurnaan sistem pembinaan transmigrasi dimasa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah untuk lebih memfokuskan berbagai kebijakan dalam menangani masalah-masalah pembinaan baik terhadap sistem, cara, dan proses penyelenggaraan program pembinaan transmigrasi untuk mendorong kemandirian masyarakat pada masa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Teori

1. Perkembangan Transmigrasi di Indonesia.

Program transmigrasi di Indonesia sudah sejak lama dilaksanakan tetapi masih tetap merupakan suatu aspek yang penting untuk dianalisis dalam kebijaksanaan pembangunan. Program ini dimulai secara kecil-kecilan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905 yang ditandai dengan mobilisasi penduduk sebanyak 155 kepala keluarga atau sekitar 815 jiwa penduduk dari Pulau Jawa ke Desa Gedong Tataan Keresidenan Lampung (Suparno, 2007:27).

Program transmigrasi yang dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda ini dilatarbelakangi kepentingan untuk menghimpun tenaga kerja upahan yang dipekerjakan di kebun-kebun milik kolonial. Perpindahan ini kemudian dikenal dengan nama "kolonisasi", suatu istilah yang berbau penjajah dan berlangsung dari tahun 1905 hingga 1941 (Mirwanto, 2003:12).

Perpindahan penduduk ini terus dilanjutkan pada masa Indonesia merdeka dengan mengganti istilah kolonisasi menjadi transmigrasi. Program ini berjalan terus hingga akhirnya berhasil dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang sejarah transmigrasi senantiasa menjadi objek yang ambisius dan banyak mengalami hambatan dari berbagai krisis di dalam negeri (Suparno, 2007:32).

Seiring dengan perkembangannya dari tahun ke tahun, program transmigrasi terus dibenahi, baik sistem, landasan, tujuan dan sasaran pembangunan transmigrasi yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban masyarakat Indonesia. Program perpindahan penduduk ini merupakan salah satu kebijakan pembangunan di Indonesia terutama untuk menciptakan pemerataan pembangunan daerah dari segi perpindahan penduduk (Suparno,2007:50).

Transmigrasi merupakan salah satu proses yang paling menonjol bagi perpindahan sumberdaya manusia dari Pulau Jawa ke pulau tertentu. Secara keseluruhan sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah berhasil mentransmigrasikan sebanyak 2.027.116 Kepala Keluarga, suatu capaian besar program transmigrasi dalam sejarah Republik Indonesia (Suparno:2007:57).

Program transmigrasi telah mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini. Dalam kurun waktu lebih dari 56 tahun pelaksanaan, program transmigrasi telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembangunan daerah, terutama di bidang pembangunan sektor pertanian maupun pengembangan wilayah. Sebagai ilustrasi dapat, dikemukakan bahwa jutaan hektar persawahan baru telah dibuka, belum termasuk perkebunan, tambak, maupun ribuan desa baru yang tumbuh menjadi ibukota Kecamatan, Kabupaten, dan Kota. Hal ini merupakan wujud keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi (Suparno, 2007:41).

Dibalik keberhasilan tersebut, banyak juga permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program transmigrasi ini. keragaman latar belakang transmigran yang hanya memiliki sumberdaya faktor produksi berupa tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, pendapatan, tingginya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan diduga berdampak terhadap ketidakmampuan mereka dalam mengelola sumberdaya lahan secara tepat dan berkelanjutan. Sementara itu pembinaan usaha tani transmigrasi yang dilakukan dari waktu ke waktu masih bersifat *top down*. Perlakuan yang diberikan juga masih menggunakan pendekatan rata-rata dalam arti pemberian perlakuan yang sama terhadap sumberdaya yang memiliki sifat yang berbeda-beda (Yudhohusodo, 1988:12).

Di sisi lain, puncak masalah terjadi pada era reformasi tahun 1999, dimana citra pembangunan transmigrasi sempat terpuruk, transmigrasi dianggap sebagai pemicu kecemburuan sosial, pemicu konflik, jwanisasi, tidak memperhatikan penduduk setempat, sistem pembinaan masyarakat dilakukan secara sentralistik dan sebagainya. Anggapan tersebut walaupun tidak seluruhnya benar, namun perlu ditanggapi secara positif dan bijak oleh seluruh penyelenggara ketransmigrasian di setiap jenjang baik di pusat, kabupaten/kota sampai dengan petugas lapangan di unit pemukiman transmigrasi harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perubahan (Pramono, 2007:27).

Secara ringkas, Transmigrasi adalah upaya mengkombinasikan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam rangka mewujudkan suatu pemukiman transmigrasi yang sesuai dengan fungsinya dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah telah banyak mengeluarkan payung hukum yang bersifat penyempurnaan undang-undang atau peraturan-peraturan ketransmigrasian yang lama dengan disemangati oleh jiwa era reformasi (Pramono, 2007:30).

2. Pembinaan Transmigrasi

Arah pembinaan transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integritas masyarakat transmigrasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dasar pembinaan adalah pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lain dan pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan. Pembinaan daerah permukiman transmigrasi sebagai proses akhir dari keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi, merupakan kunci keberhasilan proses penyelenggaraan transmigrasi. Oleh karena itu perlu pembinaan yang terarah dan terpadu dilengkapi dengan aparatur yang mampu memberi motivasi kepada masyarakat transmigran dan penduduk sekitar. Kegiatan pembinaan ini bersifat lintas sektoral dan multi kompleks yang menyangkut seluruh aspek kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu acuan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat pelaku program transmigrasi (Kepmentrans Nomor 57 Tahun 1999).

Tujuan Pembinaan Transmigran adalah terwujudnya masyarakat baru dan desa baru yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosialbudaya, pertahanan keamanan, yang mampu berkembang terus menuju desa swasembada. Sementara sasaran yang hendak dicapai dari pembinaan adalah tercapainya tingkat kehidupan masyarakat transmigran secara utuh dan dinamis material dan spritual melalui usaha-usaha dibidang sosialbudaya yang dijuruskan kearah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh dengan penduduk setempat dan masyarakat sekitar. Sedangkan dibidang ekonomi dijuruskan kepada tercapainya tingkat swasembada berdasarkan asas-asas perekonomian dengan sasaran meningkatnya pendapatan, mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi serta memperkuat basis produksi dalam usaha tani.

3. Pengembangan Masyarakat Di Permukiman Transmigrasi.

Secara konsep, pengembangan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan. Kedua perspektif tersebut dalam spektrum politis adalah aliran kiri (Sosialis-Marxis) dan aliran kanan (Kapitalis-Demokratis).

Dewasa ini dalam kontek menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi, kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif pengembangan masyarakat ke dalam dua pendekatan. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan profesional dan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi sosial.

Sementara itu berpijak pada teori struktural neo-marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidak-seimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok lemah, mencari sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber ketertindasannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Payne (1995) "*This is the type of approach which support minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation*".

Seperti yang telah diuraikan di atas, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan keragaman jenis dan tingkat praktek pengembangan masyarakat. Sebagai contoh, Dominelli, (1990), dan Mayo, (1998) menyatakan bahwa pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional.

Berdasarkan perspektif tersebut, pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam enam model, sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990 dan Mayo, 1998).

Keenam model tersebut meliputi; (1) Perawatan Masyarakat, (2) Pengorganisasian Masyarakat, (3) Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional, (4) Aksi masyarakat berdasarkan kelas sosial, (5) Aksi masyarakat berdasarkan gender, dan (6) Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) pada gugus radikal.

Selanjutnya beberapa model pengembangan masyarakat perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerja sosial. Adapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu meningkatkan perangkat pengetahuan, teknik dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi. Secara umum beberapa bidang yang harus dikuasai adalah pengetahuan kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (*welfare state*), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuan khusus di bidang pekerjaan sosial saat beroperasi seperti kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, perundang-undangan perlindungan anak serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah perkotaan dan pedesaan serta perumahan.

Mayo (1994;36) menambahkan bahwa pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan latar belakang sosial ekonomi dan politik dari wilayah tempat mereka bekerja, meliputi pengetahuan dan pemahaman terhadap struktur politik, organisasi politik yang relevan dan sumber daya didalam sektor *statutory, voluntary and community sectors* dan mereka membutuhkan untuk mengetahui dan memahami kebijakan dan praktek

pemberian kesempatan yang sama sehingga mereka dapat menerapkan hal ini secara efektif disetiap aspek yang bersangkutan.

Dalam hal pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi, perkembangan permukiman transmigrasi dirancang dalam tiga tahapan perkembangan yaitu tahap penyesuaian, tahap pemantapan, tahap pengembangan. Pada tahap penyesuaian dilakukan pembinaan agar masyarakat transmigrasi dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan barunya. Proses ini dirancang selama satu setengah tahun. Pada tahap pemantapan, masyarakat transmigran didampingi untuk dapat meningkatkan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Proses ini dilaksanakan selama satu setengah tahun sampai dengan dua tahun. Tahap pengembangan, masyarakat transmigrasi melakukan pengembangan usaha produktif secara mandiri, dan masa pembinaan berlangsung selama dua tahun sampai dengan lima tahun.

4. Sasaran Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tentang perubahan Undang-undang Nomor 15 tentang ketransmigrasian, pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi didasarkan pada potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lainnya dan pembangunan daerah secara berwawasan lingkungan.

Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spritual, kelembagaan pemerintah, dan pengelolaan sumber daya alam, disesuaikan dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokoknya.

Sasaran pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi adalah: (1) bidang ekonomi untuk menuju terciptanya swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) bidang sosial budaya untuk menuju pemenuhan kebutuhan pelayanan umum masyarakat serta terjadinya proses integrasi dan harmonisasi yang menyeluruh antara transmigran dan masyarakat sekitarnya; (3) bidang mental spritual untuk menuju pembinaan manusia yang ulet, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (4) kelembagaan pemerintah untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa; dan (5) pengelolaan sumber daya alam untuk menuju terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mencapai tingkat swasembada dan pusat pertumbuhan ekonomi pada pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dilakukan berbagai upaya antara lain melalui : (1) peningkatan kemampuan produksi dan efesiensi secara terus menerus; (2) pengembangan melalui berbagai kegiatan usaha yang beroreantasi pada pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif serta kebutuhan pasar; (3) percepatan keterkaitan fungsional intrakawasan dan antar kawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan

agroindustri dan agribisnis. Pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang sosial budaya menyangkut pemberian pelayanan berbagai fasilitas sosial di kawasan transmigrasi, baik yang berkarakteristik pedesaan maupun perkotaan.

Fasilitas sosial yang disediakan antara lain meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, kesenian, olahraga, dan pembinaan generasi muda serta pemberdayaan perempuan. Pengembangan masyarakat dibidang sosial budaya juga termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai masyarakat modern dengan tetap berpegang pada budaya nasional dan integrasi masyarakat di kawasan transmigrasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, harmonis, dan saling membutuhkan.

Dengan demikian secara alami akan terjadi proses integrasi dan harmonisasi budaya yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjamin pelayanan masyarakat yang makin baik, fasilitasi pembentukan kelembagaan pemerintahan desa atau kelurahan dan kelembagaan masyarakat perlu dipersiapkan sejak dini dan dibimbing secara intensif oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan di kawasan transmigrasi, pengelolaan sumber daya perlu dilakukan secara arif dan penuh kesadaran dengan menjaga keserasian fungsi lingkungan setempat agar pengembangan usaha dapat berkelanjutan dan pertumbuhan lingkungan permukiman dapat mendukung berjalannya fungsi perkotaan.

5. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan merupakan keharusan bagi perumus kebijakan, namun tidak terlalu ditekankan pada implementasi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pada implementasi kebijakan dan lingkungan biasanya dilakukan evaluasi. Namun demikian, evaluasi kebijakan merupakan bagian dari analisis kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan manfaat dari kebijakan.

Analisis kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik. Analisis kebijakan adalah proses intelektual yang mengawali perumusan kebijakan yang biasanya bersifat politis. Namun demikian bukan berarti analisis kebijakan tidak memasukan variabel politik didalamnya, (Kismarti, 2008:2.5).

Meskipun analisis kebijakan lebih fokus kepada perumusan, pada prinsipnya setiap analisis pasti mencakup evaluasi kebijakan karena analisis kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan, menemukan isu kebijakan, menganalisis faktor pendukung kebijakan, implementasinya, peluang evaluasi, dan kondisi lingkungan kebijakan, (Kismartini, 2008:3.15).

Demikian halnya dengan penelitian ini akan dianalisis dan diteliti apakah proses kebijakan program pembinaan terhadap warga transmigran dalam meningkatkan Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Transmigrasi RI Nomor: KEP 06 /MEN/ 1999.

B. Kerangka Berpikir

Fokus yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) IV Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumber daya alam berupa lahan usaha tani, (2) sumber daya manusia khususnya warga transmigran, (3) sarana dan prasarana yang ada serta, (4) input yang diberikan dalam program pembinaan transmigrasi sesuai dengan masa pembinaannya.

Di samping itu di dalam pembinaan masyarakat transmigrasi menurut Suparno (2007), harus ditempuh melalui 5 (lima) pendekatan seperti pendekatan : (1) Pemberdayaan Ekonomi; (2) Pemberdayaan Sosial Budaya; (3) Pemberdayaan Kelembagaan; (4) Pemberdayaan Mental Spiritual dan (5) Pemberdayaan Keamanan dan rasa Aman.

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelaahan dan pencarian solusi penanganannya adalah pendekatan sistem dengan didasarkan pada berbagai hasil analisis terhadap aspek sumberdaya manusia khususnya warga transmigran, sumber daya alam berupa lahan usaha tani, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan transmigrasi. Kerangka pikir dari penelitian ini seperti terlihat pada Bagan 2.2

Bagan 2.1



Melalui pendekatan ini, diharapkan manajemen sistem dapat diterapkan dengan mengarahkan perhatian kepada berbagai ciri dasar sistem yang perubahan dan gerakannya akan mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut (Marimin, 2004).

Di sisi lain juga akan diamati dan dianalisis implementasi atau proses pelaksanaan pembinaan secara komprehensif dalam kaitannya dengan kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/1999. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi telah mengamanatkan bahwa pembinaan terhadap para transmigran di suatu lokasi transmigrasi harus menjangkau beberapa bidang secara simultan seperti :

1. Bidang ekonomi, terdiri atas penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas lahan dan pengembangan usaha, pembentukan kelembagaan dan pemasaran, menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha.

2. Bidang sosial budaya, terdiri atas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, peningkatan peranan pemuda dan wanita, partisipasi masyarakat, seni budaya dan olahraga.
3. Bidang mental spiritual, terdiri dari ideologi, agama, sikap mental dan perilaku.
4. Bidang kelembagaan pemerintahan desa, terdiri dari penyiapan dan pembentukan prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kelembagaan serta lembaga masyarakat.
5. Bidang lingkungan pemukiman transmigrasi pada transmigrasi umum terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009,, tentang Penyelenggaraan Transmigrasi tersebut juga disebutkan bahwa pola/sistem pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi adalah kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan dalam pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi yang meliputi tujuan dan sasaran, model, penekanan, pengambilan keputusan, kepemilikan modal dan bantuan, yang disajikan berdasarkan kerangka berpikir model pembinaan masyarakat Transmigrasi seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1

Aspek	Pembinaan Masyarakat Transmigran
Sasaran	Komunitas Warga transmigran (Bisa beberapa SP, tetapi semua transmigran)
Model	Penerapan CD secara terbatas
Penekanan	Pembinaan dan fasilitasi, dengan memberikan keleluasan kepada partisipasi aktif warga transmigran
Pengambilan Keputusan	Langsung untuk kepentingan warga
Jumlah kepemilikan modal	Relatif terbatas, dengan kondisi warga yang relatif homogen
Bantuan	Perlu banyak bantuan, karena masyarakat belum berkembang

Model Pembinaan Masyarakat Transmigran

Di dalam Kepmen tersebut juga disebutkan bahwa Tahapan pembinaan terhadap transmigran di setiap lokasi transmigrasi menurut Kepmentrans dan PPH Nomor 06 Tahun 1999 dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap Penyesuaian (1 – 1,5 tahun setelah penempatan).

Tahap penyesuaian adalah suatu kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya sedang beradaptasi di lingkungan baru (sosial ekonomi, budaya dan fisik) untuk mampu melaksanakan kehidupan di lokasi baru. Indikator keberhasilan pada tahap ini ditandai melalui pendapatan per KK per tahunnya mencapai 1600 kg setara beras.

2. Tahap Pemantapan (1,5 – 2 tahun setelah penempatan)

Tahap pemantapan adalah suatu kondisi perkembangan pemukiman dimana transmigrannya telah berkemampuan mengelola asset produksi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keberhasilan pada tahap pemantapan ini ditandai melalui pendapatan per KK per tahunnya yang telah mencapai 2400 kg setara beras.

3. Tahap Pengembangan (2-5 tahun setelah penempatan)

Pada tahap ini merupakan tahap pengembangan pemukiman dimana transmigrannya telah mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan pada tahap terakhir ini ditandai dengan penghasilan per KK pertahun mampu menerobos hingga 3000 kg setara beras.

Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran sesuai dengan Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: 06/MEN/ Tahun 1999 disajikan berdasarkan kerangka berpikir tahap-tahap pembinaan masyarakat transmigrans terlihat seperti Tabel 2.2.

TABEL 2.2

TAHAP TAHAP PEMBINAAN		
Tahap Penyesuaian (1-1,5 Tahun Setelah Penempatan)	Tahap Pematapan (1,5-2 Tahun Setelah Penempatan)	Tahap Pengembangan (>2 Thn Setelah Penempatan)
Pendapatan : Setara 1.600 kg beras / tahun / KK	Pendapatan : Setara 2.400 kg beras/th/KK	Pendapatan : Setara 3.000 kg beras/th/KK
Pemerataan : Gini Ratio = 0 % Tingkat pemerataan pendapatan Masy UPT belum bisa diukur, diasumsikan tingkat pendapatannya masih merata (tidak ada kelas pendapatan) karena masih mengandalkan bantuan dari pemerintah.	Pemerataan : Gini Ratio = 0,25 % Tingkat pemerataan pendapatan Masy UPT maksimum 0,25 karena sudah mulai ada kelas pendapatan (dijadikan 10 kelas pendapatan).	Pemerataan : Gini Ratio = 0,25 % Tingkat pemerataan pendapatan Masy UPT masih diupayakan tidak lebih tinggi 0,25
Ketenagakerjaan : Ratio 1/2 pengangguran = 0 %	Ketenagakerjaan : Ratio 1/2 pengangguran = 10 % (diupayakan tidak mencapai 10%)	Ketenagakerjaan : Ratio 1/2 pengangguran = 10 % (diupayakan maksimum 10%)
Kontribusi Permukiman Trans Ratio pendapatan per kapita trans terhadap pendapatan per kab/ kota = 0,75%	Kontribusi Permukiman Trans Ratio pendapatan per kapita trans terhadap pendapatan per kab/ kota = 1 %	Kontribusi Permukiman Trans Ratio pendapatan per kapita trans terhadap pendapatan per kab/ kota = 1,1%
Keberhasilan Koperasi : • Tingkat keuntungan koperasi = 0 % (Tingkat keuntungan koperasi belum perlu diukur karena masih dalam tahap konsolidasi pengurus, usaha dan masih tahap investasi). Tingkat pelayanan koperasi = 30 %	Keberhasilan Koperasi : • Tingkat keuntungan koperasi = 0,5 % (Tingkat keuntungan koperasi diharapkan telah mencapai 50% dari bunga bank yang berlaku sehingga mampu melakukan pemupukan modal atau membagi SHU). Tingkat pelayanan koperasi = 50 %	Keberhasilan Koperasi : • Tingkat keuntungan koperasi = 1 % (Tingkat keuntungan koperasi diharapkan telah mencapai setara dengan bunga bank yang berlaku sehingga mampu melakukan pemupukan modal atau membagi SHU).

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru. Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi menurut tahapan Perkembangan Permukiman Transmigrasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP 06/MEN/1999, tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran, yang dijabarkan ke dalam empat parameter yaitu ekonomi meliputi variabel pendapatan, pemerataan, ketenagakerjaan, kontribusi permukiman transmigrasi, keberhasilan KUD/tempat pelayanan koperasi. Sosialbudaya meliputi variabel ketahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan dan KB, partisipasi masyarakat transmigran. Integrasional meliputi variabel frekwensi terjadinya konflik sara. Keaktifan dan pelayanan lembaga sosial meliputi variabel tingkat keaktifan lembaga sosial dan pelayanan.

C. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan

Transmigran

Perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran adalah Status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, integrasi sosial, keaktifan pelayanan lembaga sosial yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan masyarakat transmigran.

2. Permukiman Transmigrasi

Permukiman Transmigrasi adalah Satu kesatuan permukiman atau bagian Satuan Permukiman yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. beserta prasarana dan lingkungan yang terstruktur.

3. Transmigrasi

Transmigrasi adalah Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

4. Transmigran

Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke wilayah Pengembangan Transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.

5. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

Pembinaan Masyarakat Transmigrasi adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan pemerintah atau pihak-pihak non pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitarnya.

6. Peningkatan Kesejahteraan Transmigran

Peningkatan Kesejahteraan yang dimaksud adalah mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial didalam memenuhi seluruh hajat hidup transmigran, baik bagi diri dan keluarga maupun bagi pengembangan generasi penerusnya.

7. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang dengan memperhatikan infut yang tersedia.

8. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan adalah Tindakan yang diperlukan untuk dibuat sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang lama, mencakup evaluasi kebijakan, menganalisis faktor pendukung kebijakan, implementasinya, dan kondisi lingkungan kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini dianalisis kebijakan publik dalam program pembinaan terhadap warga transmigrasi. Kebijakan publik yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Nomor: KEP 06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data eksploratif yang bertujuan mendeskripsikan data hasil penelitian. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian.

Tipe penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini mendeskripsikan hasil rekonstruksi suatu fenomena perkembangan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu cara menjelaskan kondisi hubungan perkembangan program transmigrasi dan faktor-faktor lain sebagai variable untuk dihadapkan dengan variable perkembangan lain.

Menurut Azwar (1998) metode deskriptif adalah penelitian dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Moleong (2000) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam artian laporan penelitiannya akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan dan dokumen resmi.

Mengingat keterbatasan waktu penelitian maka ruang lingkup yang akan diteliti adalah bagaimana proses pembinaan yang telah dilaksanakan oleh *stakeholder* di UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam kaitannya dengan implementasi Kepmen Trans dan PPH Nomor :KEP 06/MEN/1999.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga transmigran yang ada di lokasi unit pemukiman transmigrasi Lokasi tersebut terdiri dari dua dusun yang masing-masing terdiri dari dua rukun tetangga. Memiliki sepuluh kelompok tani yang masing-masing beranggotakan 20 (dua puluh orang).

Penarikan sampel dilakukan bertahap melalui langkah berikut ini:

1. Menentukan 2 (dua) sampel dari masing kelompok tani secara acak. Dari pendekatan ini diperoleh sepuluh kelompok tani dikali 2 (dua) anggota = 20 (dua puluh) sampel.
2. Memilih dengan sengaja informan dari yang mewakili perangkat desa sebanyak Enam orang diantaranya, Satu orang kepala desa, Satu Orang sekretaris desa, dan Empat orang Tuha Peut.

Mewakili tokoh masyarakat sebanyak empat orang terdiri dari masing-masing satu orang tokoh pemuda, satu orang tokoh wanita, tokoh agama satu orang, dan rohaniwan satu orang.

2. Memilih dengan sengaja pemangku kepentingan yang ada keterkaitannya dengan pembinaan transmigran seperti dari unsur kecamatan sebanyak satu orang, unsur pemerintah daerah satu orang, unsur legislatif satu orang, unsur dinas terkait dari propinsi dan kabupaten masing-masing satu orang.
3. Memilih dengan sengaja unsur tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari luar lokasi unit pemukiman transmigrasi sebanyak dua orang.
4. Penelitian ini dilaksanakan sejak Oktober hingga Desember 2010 di lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Pemerintah Aceh.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi kelompok. Instrumen pengumpulan data Penelitian ini berbentuk angket/cheklist (pilihan ganda) dan wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka, artinya responden lebih bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Peneliti juga menekankan pada objektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada responden.

Data primer dan data sekunder yang bersifat visual diperoleh dari observasi lapangan melalui teknik dokumentasi data.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian pendekatan kualitatif proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kaitan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)

Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan sesuai dengan rencana, peneliti terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik kelengkapan administratis berupa surat izin penelitian maupun semua masalah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yaitu pedoman wawancara dan lain-lain. Dalam wawancara peneliti menjelaskan kepada informan bahwa data ini akan digunakan untuk studi ilmiah dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, mengingat peneliti sudah menjadi bagian dari kegiatan pembinaan Transmigran, maka secara otomatis peneliti dapat berpartisipasi penuh dengan informan-informan. Namun demikian peneliti tetap melakukan adaptasi berdasarkan hubungan simpatik, sehingga dapat mengurangi jarak antara peneliti dengan informan agar tidak menimbulkan subjektivitas yang berlebihan. Pengumpulan data secara partisipatif mengandung unsur subjektivitas, namun peneliti berupaya mengatasinya dengan cek dan ricek data melalui *fokus group discussion* (FGD).

2. Ketika berada dilokasi penelitian (*Getting Along*)

Posisi peneliti sudah menjadi bagian dari objek yang diteliti, peneliti dapat langsung menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan subjek peneliti, dengan tetap menjaga objektivitas dari data atau informan, dengan mencatat apa adanya yang disampaikan oleh informan.

3. Mengumpul Data (*Logging The Data*)

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan beberapa kali wawancara dengan masing-masing informan dengan mempedomani paduan wawancara terlampir, hingga data yang diperoleh dianggap cukup. Wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan antara lain warga Transmiring, tokoh agama, imam mukim, tuha peut, tuha lapan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, perangkat desa serta *stakeholder lain* seperti Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, lembaga dan Instansi lainnya yang mempunyai tugas kepedulian terhadap pembinaan masyarakat. Dalam wawancara meskipun menggunakan *questionnaire* namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan jawaban yang berbeda. Proses wawancara dilakukan per individu maupun beberapa orang sekaligus dalam satu tempat dan waktu (daftar wawancara terlampir).

b. Pengamatan/Observasi

Metode pengumpulan data dengan pengamatan/observasi ini dilakukan dengan mengamati secara sistematis dan empirik aktivitas yang dilakukan masyarakat dan kelembagaan di kawasan transmigrasi dalam kaitan dengan pola hidup, etos kerja yang berjalan selama ini. Dalam pengamatan ini akan diperoleh gambaran mengenai fenomena kehidupan dan potensi masyarakat setempat, termasuk bagaimana bentuk-bentuk kearifan lokal yang merupakan sumber daya lokal yang akan mendukung proses pengembangan masyarakat.

Dalam pengamatan/observasi tersebut ada beberapa aspek yang akan diamati yaitu :

- (1) *Ruang atau tempat*: lokasi-lokasi yang menjadi tempat permukiman dan fasilitas yang sering digunakan masyarakat / penduduk untuk berkumpul, misalnya di gardu, ladang, balai desa, mushola, dan lain-lain.
- (2) *Kelompok Masyarakat*: kelompok masyarakat yang menjadi pelaku atau potensial menjadi pelaku dan sekaligus penggerak dalam pengembangan masyarakat.
- (3) *Kegiatan*: bagaimana kegiatan atau aktivitas yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam kaitannya dengan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

- (4) *Potensi Lokal*: misalnya, sumber daya lokal yang ada dan yang potensial dalam mendorong program pengembangan ekonomi masyarakat. Bagaimana pula potensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat untuk mendorong proses pengembangan yang berkelanjutan.
- (5) *Waktu*: saat-saat kapan (musim apa) masyarakat bekerja di ladang, panen dan waktu-waktu luang bagi sebagian besar masyarakat di kawasan transmigrasi.,

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian. Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

4. Jenis Data

a. *Data untuk sub sistem bidang ekonomi*

Bidang ekonomi terdiri dari berbagai parameter yaitu: penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas lahan dan pengembangan usaha, pembentukan kelembagaan dan pemasaran, partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha yang digunakan.

1. Untuk parameter penyediaan sarana produksi. Data yang dikumpulkan meliputi : data-data fisik lahan, legalitas lahan, sarana dan prasarana, dan fasilitas umum.

2. Untuk parameter peningkatan produktivitas lahan dan pengembangan usaha Data yang dikumpulkan meliputi program-program pembinaan, bantuan-bantuan, paket A,B,C serta bantuan-bantuan lain yang telah diberikan.
3. Untuk parameter pembentukan kelembagaan dan pemasaran. Data yang dikumpulkan meliputi: pasar terdekat, lembaga ekonomi; KUD dan lain-lain.
4. Untuk parameter partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha. Data yang dikumpulkan meliputi: perusahaan/investor yang ada, sistem kemitraan dengan investor, jumlah kelompok tani, dan lain-lain

b. Data untuk bidang ekonomi /sosial dan budaya

Data yang dikumpulkan untuk sub-sistem ini juga terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survai sosial-ekonomi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah seperti monografi desa, laporan survai ekonomi terdahulu, data Kecamatan/Kabupaten dalam angka, hasil-hasil survai BPS, dan lain-lain digunakan :

1. Untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dalam mengolah LP dan LU. Data yang dikumpulkan meliputi data-data: lamanya mengolah, jumlah tenaga yang terlibat, upah kerja, peralatan yang digunakan, jumlah pupuk, jumlah benih/bibit dan obat-obatan yang dipakai dan biaya transportasi.

2. Untuk menghitung biaya hidup petani. Data yang dikumpulkan meliputi data-data : biaya makan dan minum, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, perumahan, sandang dan kegiatan sosial.

3. Untuk menentukan kondisi sosial budaya dan ekonomi transmigran. Data yang dikumpulkan meliputi data-data : jumlah anggota keluarga, pendidikan, kesehatan, pendapatan, kepemilikan lahan (2 ha), sarana perumahan, sarana transportasi, agama, lembaga sosial, lembaga ekonomi, integrasi sosial, administrasi pemerintahan, makanan, aksi sosial, partisipasi, kompetensi organisir, kompetensi/keterampilan transmigran, komoditas, harga komoditas, degradasi lahan/air, kesesuaian lahan, pelatihan, demplot, manajemen UPT, produktifitas usaha tani (*on farm*) dan produktifitas usaha lainnya (*off farm*).

c. Data untuk sub-sistem sumberdaya manusia

Data untuk sub-sistem sumberdaya manusia ini dikumpulkan terutama dari data primer. Meskipun demikian, data sekunder yang menyangkut sumberdaya manusia transmigran di lokasi juga ditambahkan :

1. Untuk menghitung tingkat kepercayaan diri transmigran. Data yang dikumpulkan meliputi data-data: tingkat pendidikan, usia, pendapatan, tingkat keterampilan, penguasaan teknologi, peran, tersingkirkan dan organisir.

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi diri transmigran. Data-data yang dikumpulkan meliputi data-data tingkat pendidikan, usia, tingkat ketrampilan dan organisier.
3. Untuk mengetahui tingkat tanggung jawab transmigran: Data-data yang dikumpulkan yakni tingkat pendidikan, usia dan organisier.
4. Untuk mengetahui tingkat keuangan pendanaan transmigran. Data yang dikumpulkan meliputi data-data: modal, pendapatan, kesejahteraan.
5. Untuk mengetahui tingkat kompetensi transmigran. Data yang dikumpulkan meliputi data-data tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, tenaga kerja, pelatihan teknologi budidaya pertanian, pelatihan teknologi penggunaan hasil, pelatihan konservasi tanah dan air, pelatihan pemasaran, tingkat kemiskinan, informasi pemasaran, pengetahuan/pengelolaan lahan kering, jiwa wiraswasta, pengetahuan peluang pasar, organisasi.
6. Untuk mengetahui tingkat kelembagaan. Data yang dikumpulkan meliputi data-data tentang kantor UPT, lembaga perekonomian UPT, lembaga pemerintahan UPT, kelompok-kelompok sosial yang ada, CD *Worker*, kelembagaan tingkat kabupaten dan provinsi.

E. Metode Analisa Data

Dalam metode analisis data ini, menggunakan empat tahapan kegiatan, yaitu tahap identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

1. Tahap *identifikasi* adalah tahap yang dilakukan ketika data primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui kajian pustaka, observasi, wawancara dengan respon menggunakan kuisioner dan Teknik PRA , kemudian diidentifikasi berdasarkan substansi permasalahannya. Pada tahap ini dilakukan pembersihan terutama terhadap data yang terjaring yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan hanya data yang terkait dengan fasilitasi pemberdayaan masyarakat akan diolah lebih lanjut.
2. Tahap *kategorisasi* adalah tahap yang dilakukan pada saat data yang sudah teridentifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan antara satu dengan yang lain sehingga dapat diketahui data yang satu masuk ke dalam kategori yang tertentu, sebaliknya data yang lain masuk ke dalam kategori yang lainnya pula. Pada tahap ini data sudah terpola ke dalam berbagai kelompok-kelompok data.
3. Tahap *interpretasi* adalah tahap dilakukan ketika data yang sudah dikategorisasi kemudian dilakukan pengaitan antara satu dengan lain untuk selanjutnya dilakukan interpretasi dan penafsiran untuk mengaitkan dan melihat hubungan antara data yang satu dengan yang lain.
4. Tahap *penarikan kesimpulan* adalah tahap yang digunakan ketika data yang sudah diinterpretasi, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang menghasilkan butir-butir penting yang merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

I. TEMUAN.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Administrasi

Fokus penelitian ini adalah Unit Pemukiman Transmigrasi IV Sp 6 Alue Peunyareng secara administratif, UPT ini terletak di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 593.32/196/1980 , tanggal 15 April 1980. dicadangkan areal untuk lokasi transmigrasi Alue Peunyareng seluas 14.000 hektar. Areal efektif untuk lokasi Transmigrasi Alue Peunyareng SP 6 seluas 425 Ha. Dengan batas-batas wilayahh sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Desa Tumpuk Ladang.
- Sebelah Selatan dengan Desa Ujong Tanoh Darat.
- Sebelah Barat dengan Desa Pasi Aceh Baroh/Pasie Aceh Tunong.
- Sebelah Timur dengan Desa Balee.

2. Letak Geografis

Secara Geografis Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Alue Peunyareng IV Sp Kecamatan Meureubo terletak antara:

04 15'23" – 04 16'36" Lintang Utara.

96 08'36" – 96 09'23" Bujur Timur.

3. Aksesibilitas Lokasi Penelitian

Untuk pencapaian ke lokasi UPT IV Sp 6 Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo dapat ditempuh melalui jalan darat, dari Banda Aceh-Meulaboh dengan menempuh perjalanan sepanjang 248 km dalam waktu selama 6 jam. Selanjutnya dari Meulaboh ke Lokasi penelitian juga dapat ditempuh melalui jalan darat sepanjang 12,5 km selama 60 menit. Sarana transportasi yang dapat digunakan lewat rute ini adalah angkutan umum Mini Bus. Untuk jelasnya dapat dilihat Tabel 4.1

Tabel 4.1

Aksesibilitas Lokasi Penelitian UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo Aceh Barat

No.	Asal	Tujuan	Jarak (km)	Waktu (jam)
1.	Banda Aceh	Meulaboh	248	6 jam
2.	Meulaboh	Lokasi UPT	12,5	60 menit

Sumber : Monografi UPT (2010)

4. Topografi

Kondisi topografi suatu lokasi transmigrasi mempengaruhi bentuk pemanfaatan lahan usaha tani. Bentuk pemanfaatan lahan usaha tani pada kondisi lahan datar akan berbeda dengan kondisi lahan bergelombang. Lokasi UPT IV Sp 6 Alue Peunyareng, kondisi topografinya cukup bervariasi sebagaimana yang tersebut dalam Buku Monografi UPT (2010) sebagai berikut :

- Kondisi datar (kemiringan 0 – 3 %) seluas 297,5 ha.
- Kondisi berombak (kemiringan 4 – 8%) seluas 127,5 ha.

5. I k l i m

Kondisi iklim suatu daerah sangat menentukan peluang usaha tani dalam kaitannya dengan penentuan musim tanam. Periode tanam menentukan pola dan jadwal tanam yang akan diterapkan disesuaikan dengan kondisi fisik lahan.

Berdasarkan data curah hujan di daerah studi dari hasil pencatatan stasiun hujan Pulo Ie rata-rata curah hujan 327,75 mm/tahun. Bulan kering atau musim kemarau terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei, berlangsung selama lebih kurang lima bulan. Sedangkan bulan basah terjadi antara bulan Juli sampai dengan Desember. Oleh penduduk setempat musim penghujan dimanfaatkan untuk mengolah lahan sawah yaitu untuk pertanian tanaman pangan seperti palawija, padi gogo, jagung dan kacang-kacangan.

Sementara untuk musim tanam yang aman, dapat direkomendasikan apabila prosentase rata-rata curah hujan bulanan dibandingkan dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 8% sampai dengan 12%. Dengan demikian musim tanam yang aman di daerah studi adalah pada bulan September sampai dengan Desember . Tetapi dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan beberapa penduduk bahwa musim tanam di lokasi studi mulai bulan Oktober sampai bulan Desember setiap tahunnya.

6. Hidrologi

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan program permukiman, untuk itu air harus tersedia cukup untuk kepentingan penduduk, baik untuk keperluan rumah tangga maupun usaha pertanian. Kondisi hidrologi UPT IV Alue Peunyareng SP 6 dibagi menjadi 3 yakni air permukaan, air tanah dan air hujan. Air hujan telah diterangkan pada bagian iklim. Air permukaan di UPT studi berupa alur-alur sungai yang berair pada musim penghujan dan kering atau debit airnya kecil pada musim kemarau.

Air tanah yang dimanfaatkan berupa air sumur gali dengan kedalaman berkisar antara 3 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Berdasarkan hasil survey lapangan kondisi sumber air bersih di Lokasi UPT IV Sp 6 Alue Peunyareng tersedia 50 (lima puluh) buah sumur gali serta 2 (dua) unit sumur bor yang dipakai oleh 200 KK.

Penggunaan sumur gali di desa tersebut dapat diperoleh pada kedalaman 3 meter namun kualitas airnya berbau amis. Pada keadaan kemarau masyarakat di desa tersebut dapat memperoleh sumber air bersih pada alur-alur yang ada di sekitar lokasi.

Mengatasi kendala tersebut, dirasa penting untuk mendapat perhatian pemerintah untuk pengadaan sumber air bersih melalui teknologi perpipaan, maupun pompanisasi. Agar pembangunannya dapat berhasil dengan baik sangat diperlukan perencanaan design sumber air bersih di kedua desa tersebut.

7. Jenis Tanah

Klasifikasi tanah dalam wilayah survey di klasifikasikan menurut sistem PPT (1983) yang dibakukan ke dalam sistem taxonomi tanah USDA 1987/1990 dan FAO-UNESCO (1985). Hasil pengamatan lapangan yang didukung dengan hasil analisis laboratorium (hasil studi RTSP), dapat diketahui di lokasi studi disusun oleh 2 (dua) jenis tanah , yakni jenis podsolik dan alluvial.

Berdasarkan hasil penelitian laboratorium oleh Sub. Dinas Pengembangan Sumber Daya Kawasan, kesesuaian lahan cocok untuk tanaman pangan, hortikultura dan tanaman tahunan dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah sampai dengan sedang serta pH tanah 4,5 sampai 4,9.

8. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan di lokasi studi seluas 404 hektar terdapat peruntukan lahan masing-masing untuk lahan pekarangan (perumahan) 20 ha dan untuk lahan usaha I seluas 180 ha serta untuk lahan fasilitas umum 4 ha.. Sedangkan untuk lahan usaha II seluas 200 ha, diberikan dalam bentuk hutan untuk warga transmigran, dengan klasifikasi penggunaan lahan seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

No.	Nama UPT	Jenis Penggunaan Lahan (ha)		
		LP	LU I	LU II
1.	Alue Peunyareng Sp 6	20	180	200
	Jumlah	20	180	200

Sumber : RTSP UPT IV Alue Peunyareng Sp 6, (2004).

Klasifikasi Penggunaan Lahan di UPT IV Alue Peunyareng Sp 6

9. Kesuburan Tanah

Hasil analisis laboratorium RTSP UPT Alue Penyareng terhadap tanah, menunjukkan bahwa tanah di lokasi studi memiliki tingkat kesuburan tanah yang berada pada kriteria rendah hingga sedang untuk seluruh satuan peta lahan (SPL).

Tanah seperti ini memerlukan perlakuan khusus, misalnya input pupuk yang lebih tinggi atau perlakuan terasering untuk lahan dengan kemiringan lebih dari 8%. Tingkat kesuburan harus dikelola dengan baik agar diperoleh hasil yang berkesinambungan. Penilaian dari status kesuburan tanah ini diambil dari contoh komposit dan penggalian profil pada tanah pekarangan dan bagian tanah lainnya.

Penilaian ini merupakan kombinasi dari beberapa sifat kimia tanah antara KTK, Kejenuhan Basa, Kandungan P₂O₅, K₂O dan C-Organik.

10. Tekstur Tanah

Hasil penelitian lapangan yang didukung data detail analisa laboratorium hasil RTSP menunjukan tekstur tanah di lokasi study umumnya lempung hingga liat. Struktur tanah gumpal, yang demikian itu merupakan kondisi tanah yang beraerasi baik, daya tumbuh kembang akar tanaman lebih mudah, hal ini berkaitan erat dengan struktur tanah yang gembur.

11. Flora dan Fauna

Pengumpulan data tentang flora dan fauna di lokasi penelitian dilakukan melalui pengamatan/observasi adanya bekas aktivitas fauna dan wawancara dengan penduduk setempat.

a. Flora

Vegetasi yang terdapat di lokasi studi merupakan hutan tropis dengan vegetasi beragam. Hasil identifikasi lapangan, di lokasi studi terdapat beragam jenis flora baik jenis monokotil maupun dikotil.

b. Fauna

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fauna dan didukung dengan hasil wawancara masyarakat di sekitar lokasi survey, ternyata ada beberapa jenis fauna yang dilindungi seperti ayam hutan (*Galus sp.*), Harimau dan Gajah. Jenis satwa yang berpotensi menjadi hama bagi tanaman pertanian adalah babi hutan, tikus, kera, tupai dan landak.

B. Kedaan Sosial Budaya

1. Kependudukan

Berdasarkan buku Monografi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo (2010), penduduknya berjumlah 931 jiwa (207 KK). Jumlah tersebut terdiri dari 461 laki-laki dan 470 perempuan. Setiap kepala keluarga rata-rata terdapat 5 jiwa. Artinya setiap keluarga mempunyai 2-3 orang anak.

Dari data penduduk di atas, dalam perkembangannya pada saat ini penduduk di lokasi studi jika didasarkan atas usia diperoleh data bahwa usia balita 9,82%, Usia sekolah 33,07%, usia produktif 52,78% serta usia diatas 54 tahun sebanyak 4,33%.

Dari data tersebut terlihat bahwa penduduk yang telah memasuki usia produktif (umur 14 sampai 44 tahun) terlihat cukup besar. Kondisi seperti ini telah memberikan peluang bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengikutsertakan mereka dalam segala bidang pembangunan.

Karena jumlah usia produktif yang begitu besar juga merupakan aset daerah terutama dalam penyediaan tenaga kerja. Selanjutnya bila dikaitkan dengan sampel lokasi penelitian maka dipilihnya warga UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 sebagai sampel sangat tepat, karena didukung oleh status lokasi tersebut sebagai tempat dilaksanakan program pembinaan transmigrasi di Kecamatan Meureubo, Sehingga memenuhi persyaratan untuk diteliti serta dapat mewakili dengan jumlah penduduk yang ada di sekitar lokasi studi.

2. Pendidikan

Penduduk di lokasi studi terlihat 33,07% pernah mengesap pendidikan, minimal tingkat dasar. Jumlah penduduk yang buta huruf sangat sedikit sekali. Hal ini karena didukung fasilitas pendidikan yang tersedia cukup memadai. Prasarana pendidikan yang ada di lokasi studi hingga kota Kecamatan Meureubo tersedia lengkap.

Di lokasi studi juga telah tersedia sekolah dasar. Bahkan pasca bencana tsunami di Aceh, melalui bantuan Unicef salah satu NGO dari PBB, telah dibangun gedung sekolah dasar yang representatif, dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, sementara untuk SMP dan SMA telah tersedia di kota kecamatan. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana pendidikan menurut jenis pendidikan terlihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah Menurut Jenis Pendidikan
Dalam Kecamatan Meureubo

No.	Gampong	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA	PT
1.	Ujong Drien	1	-	-	-	-
2.	Meureubo	2	2	1	-	-
3.	Langung	-	-	-	1	-
4.	Paya Peunaga	-	-	-	-	-
5.	Peunaga Rayeuk	-	-	-	-	-
6.	Gunong Kleing	-	1	-	-	-
7.	Peunaga Pasie	-	-	-	-	-
8.	Peunaga Cut	-	-	-	-	-
9.	Ujong Tanjung	-	-	-	-	-
10.	Balee	-	-	-	-	-
11.	Reudep	-	-	-	-	-
12.	Pucok Reudep	-	1	-	-	-
13.	Bukit Jaya	-	1	-	-	-
14.	Sumber Batu	-	1	-	-	-
15.	Trans Sp.6	1	1	-	-	-
16.	Pasi Pinang	-	-	-	-	-
17.	Pasi Mesjid	-	-	-	-	-
18.	Rantau Panyang B.	-	-	-	-	-
19.	Rantau Panyang T.	-	-	-	-	-
20.	Mesjid Tuha	1	-	-	-	-
21.	Ranub Dong	-	-	-	-	-
22.	Ujong Tanah Darat	-	-	-	-	-
23.	Pulo Teungoh	-	-	-	-	-
24.	Pasi Aceh Baroh	-	-	-	-	-
25.	Pasi Aceh Tunong	-	-	-	-	-
26.	Paya Baro	-	-	-	-	-
27.	Buloh	1	1	-	-	-
Jumlah		6	8	1	1	-

Sumber : Kecamatan Meureubo dalam Angka (2010)

Dari data di atas terlihat bahwa lembaga pendidikan yang ada di Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 khususnya, telah tersedia lengkap dan dalam lingkup Kecamatan Meureubo untuk semua strata telah mencukupi sampai 16 unit. Dengan rincian tingkat kanak-kanak 6 unit; tingkat dasar 8 unit, tingkat pertama 1 unit, dan sekolah tingkat atas 1 unit.

Dari jumlah tersebut terlihat desa UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 telah mempunyai sarana pendidikan terlengkap khususnya tingkat kanak-kanak dan tingkat sekolah dasar. Dengan demikian jika dibandingkan dengan desa lain, maka desa UPT IV Alue Peunyareng merupakan lokasi desa yang telah memiliki sarana pendidikan yang cukup representatif. Hal ini suatu kewajaran karena lokasi UPT tersebut merupakan lokasi yang masih dalam masa pembinaan oleh Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi Pusat, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Aceh Barat.

3. Tempat Peribadatan

Masyarakat transmigran Alue Peunyareng umumnya penganut agama Islam taat. Hal ini terbukti dengan tersedianya tempat peribadatan seperti meunasah/mushalla di setiap dusun dalam desa tersebut. Demikian pula masjid dan tempat/balai pengajian non formal seperti TPA, TPQ dan TQA juga terdapat di setiap dusun dalam lokasi transmigrasi tersebut.

Saat ini Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo memiliki 4 unit Mushalla/Meunasah , 2 unit tempat pengajian , 3 Taman Pendidikan Al Qur'an baik TPA, TPQ dan TQA.

Dari data lapangan menunjukkan bahwa sarana peribadatan dalam hal ini mushalla/meunasah secara merata telah tersedia di lokasi. Bahkan di pusat desa/lokasi UPT terdapat 1 unit meunasah milik dusun di samping 1 unit mesjid milik lokasi UPT. Meunasah merupakan tempat ibadah terkecil setelah masjid.

Biasanya di Aceh secara umum dan di Lokasi UPT khususnya, meunasah di samping difungsikan sebagai sarana ibadah juga dipergunakan sebagai tempat musyawarah/pertemuan warga desa untuk membahas dan memutuskan sesuatu kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sementara sarana ibadah lain seperti masjid biasanya dimiliki oleh beberapa desa dalam suatu wilayah kecil seperti kemukiman atau wilayah agak besar seperti kecamatan. Sedangkan tempat pengajian lain seperti TPA biasanya dikelola secara perorangan yang ada di suatu desa atau kecamatan. Sementara pondok pesantren yang juga merupakan lembaga pendidikan islam umumnya dikelola oleh perorangan/yayasan yang dipimpin langsung oleh seorang tokoh agama yang akrab dipanggil Teungku Pesantren.

Dalam hal pelaksanaan program pembangunan lokasi pemukiman transmigrasi di wilayah Aceh Barat umumnya dan di Kecamatan Meureubo khususnya termasuk pembangunan lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6, sejak awal peran ulama atau teungku pesantren

cukup memberikan andil terutama dalam hal memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana cara menyikapi perbedaan adat dalam pandangan islam.

Sehingga dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir ketidakharmonisan yang terjadi antara warga desa setempat dengan warga desa sekitar.

Sejak awal program pembangunan lokasi transmigrasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 yang terletak di Desa Pucuk Reudup, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk secara koordinatif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Aceh Barat selalu meminta arahan dan bimbingan kepada tokoh agama di lokasi studi untuk ikut mensosialisasikan program pembangunan lokasi transmigrasi kepada masyarakat Kecamatan Meureubo.

4. Kesehatan

Secara umum penduduk Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan Meureubo telah menyadari arti pentingnya kesehatan dan lingkungan. Namun demikian masih juga terdapat beberapa kepala keluarga yang belum mengetahui akibat buruk dari kurang bersihnya lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya perilaku membuang hajat disembarang tempat seperti di selokan. Kondisi ini diduga karena ketidakterseediaannya MCK di rumah atau memang sudah tradisi/kebiasaan yang bersangkutan yang membuang hajat di selokan atau alur-alur yang ada di sekeliling rumah. Akan tetapi kondisi rumah sudah memadai dan memenuhi syarat sebagai rumah

layak huni. Hal ini ditandai dengan kondisi sanitasi rumah yang sudah standart serta banyak penduduk dalam membersihkan diri telah menggunakan sumbu keluarga yang telah ada disetiap KK. Kondisi ini terjadi karena didukung dengan terbentuknya pos-pos kesehatan dan keluarga berencana di setiap desa. Data sarana kesehatan di Kecamatan Meureubo menurut desa dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel. 4.4
Sarana Kesehatan Dirinci Menurut Desa
Dalam Kecamatan Meureubo.

No.	Gampong	Pustu	BPU	Psksms	RS	RB	BKes
1.	Ujong Drien	1	-	-	-	-	-
2.	Meureubo	2	-	-	-	-	-
3.	Langung	-	-	1	-	-	2
4.	Paya Peunaga	-	-	-	-	-	-
5.	Peunaga Rayeuk	-	-	-	-	-	-
6.	Gunong Kleing	-	-	-	-	-	-
7.	Peunaga Pasie	-	-	-	-	-	1
8.	Peunaga Cut Ujong	1	-	-	-	-	-
9.	Ujong Tanjung	-	-	-	-	-	-
10.	Balee	-	-	-	-	-	-
11.	Reudep	1	1	-	-	-	-
12.	Pucok Reudep	-	-	-	-	-	-
13.	Bukit Jaya	1	-	1	-	-	-
14.	Sumber Batu	1	-	-	-	-	-
15.	Trans Sp.6	1	-	-	-	-	-
16.	Pasi Pinang	-	-	-	-	-	1
17.	Pasi Mesjid	1	-	-	-	-	-
18.	Rantau Panyang Barat	-	-	-	-	-	-
19.	Rantau Panyang Timu	-	-	-	-	-	-
20.	Mesjid Tuha	-	-	-	-	-	-
21.	Ranub Dong	-	-	-	-	-	-
22.	Ujong Tanah Darat	-	-	-	-	-	-
23.	Pulo Teungoh	-	-	-	-	-	-
24.	Pasi Aceh Baroh	-	-	-	-	-	-
25.	Pasi Aceh Tunong	1	-	-	-	-	-
26.	Paya Baro	-	-	-	-	-	-
27.	Buloh	1	-	-	-	-	1
Jumlah		11	1	2	-	-	5

Sumber : Kecamatan Meureubo dalam Angka (2010)

Dari tabel di atas, terlihat di setiap desa telah terbentuk pos kesehatan dan keluarga berencana termasuk di lokasi studi. Ini artinya di Kecamatan Meureuboo untuk masalah kesehatan baik kesehatan diri maupun lingkungan telah tersentuh. Kecuali itu secara umum di Kecamatan Meureubo juga telah tersedia puskesmas, poliklinik, pustu, klinik bersalin dan tempat praktek dokter.

Sementara untuk pengobatan yang lebih besar masyarakat dapat merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien di Kota Meulaboh yang hanya berjarak 12,5 km.

5. Integrasi Sosial

Apabila kita lihat dari segi integrasi sosial masyarakat yang bermukim dilokasi Unit Pemukiman Transmigrasi SP 6 Alue Penyareng berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada umumnya mereka merasa betah tinggal dilokasi, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah kepala keluarga yang ditempatkan pada tahun 2004 sebanyak 200 KK, perkembangan sampai saat ini telah mencapai 2007 kepala keluarga. Penambahan tersebut karena adanya Pecahan Kepala Keluarga diantaranya telah terjadi asimilasi. Hal ini diduga mereka telah banyak menerima manfaat dan merasakan adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan khususnya melalui program transmigrasi.

II. PEMBAHASAN.

A. Program Pembinaan

Pembinaan transmigran sebagai poroses akhir dari keseluruhan penyelenggaraan transmigrasi, merupakan kunci keberhasilan keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi. Kegiatan pembinaan bersifat lintas sektoral dan multi kompleks menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997, tentang Ketransmigrasian, meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang mental spiritual, pengembangan kelembagaan, dan bidang lingkungan hidup.

1. Pembinaan Bidang Ekonomi

Pembinaan bidang ekonomi dilakukan melalui berbagai pengembangan usaha harus diupayakan agar dapat mencapai tahap pengembangan ekonomi yang mampu memupuk modal atau kemampuan lain agar dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan dengan didasarkan pada tatanan ekonomi bersama yang berasaskan kekeluargaan melalui lembaga koperasi. Untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak, kemampuan produksi dan efesiensi perlu ditingkatkan secara terus-menerus dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan usaha terpadu yang

berorientasi pada pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif serta kebutuhan pasar.

Indikator ideal perkembangan ekonomi di lokasi transmigrasi, dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana ekonomi yang ada, usaha tani, kemitraan, dan kelembagaan ekonomi. Data yang ada di lokasi penelitian diambil dari data perkembangan UPT dan hasil wawancara dengan responden menunjukkan keberadaan komponen-komponen indikator masih terbatas diantaranya :

a. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Bangunan prasarana ekonomi di lokasi penelitian seperti gudang 2 unit, gedung KUD 1 unit, warung 2 unit, kondisi dalam keadaan baik. Kondisi ini akan sangat membantu masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kelancaran pengembangan usaha ekonomi.

b. Usaha Tani

Komoditas pertanian yang diusahakan warga berupa, padi ladang, padi sawah, kacang tanah, kedelai, jagung dan ubi kayu dapat tumbuh dengan baik, namun dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan responden menunjukkan hasil produksi pertanian masih rendah disebabkan karena belum dimanfaatkan lahan usaha secara optimal serangan hama dan penyakit tanaman yang cukup tinggi dan juga dalam usahanya terkendala dengan terbatasnya modal untuk usaha tani, sedangkan bantuan dari pemerintah sangat terbatas.

Dilihat dari luas lahan berdasarkan pembagian dan pengelolaannya, lahan pekarangan yang dibagikan 20 ha di usahakan 20 ha, lahan usaha satu dibagikan 180 ha diusahakan 97 ha, lahan fasilitas umum 4 ha diusahakan 4 ha, sedangkan untuk lahan usaha dua dibagikan 200 ha dalam keadaan hutan belum diusahakan sama sekali. Hal ini menunjukkan pengelolaan lahan usaha di lokasi penelitian belum optimal diusahakan.

c. Kemitraan

Di lokasi penelitian belum dikembangkan pola kemitraan. Karena lokasi penelitian merupakan permukiman pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK), usaha tani dilakukan secara individu.

d. Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi berupa Koperasi Unit Desa sudah terbentuk dengan nama “Jasa Krueng Tujuh”, berdiri tanggal 26 Juli 2005, dan sudah berbadan hukum Nomor :368/BH/KOP.1.6/III/2006. Saat ini masih aktif tetapi hanya bergerak dalam bidang Unit Simpan Pinjam, pengadaan saprodi, hal ini disebabkan karena keterbatasan modal dan sarana pendukung lainnya, tingkat kesadaran berkoperasi masih rendah, organisasi dan tataaksana administrasi belum berfungsi sehingga KUD belum berperan secara aktif mendukung perekonomian masyarakat.

e. Mata Pencarian

Selain berusaha tani sebagian masyarakat di lokasi penelitian juga mempunyai pekerjaan tambahan sebagai pedagang, usaha jasa dan lain-lain, dengan penghasilan rata-rata transmigran dari usaha tersebut sebesar Rp.1.550.000 s/d Rp. 5.250.000 per bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Mata Pencaharian Transmigran

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KISARAN PENDAPATAN (Rp/tahun/orang)
1	Tukang/Pemborong		
	A Tukang Kayu	15	18.600.000,-
	B Tukang Batu	5	19.200.000,-
2	Dagang		
	a. Toko kelontong	5	63.00.000,-
3	Industri Kecil/Rumah Tangga	-	-
4	Jasa		
	A Bengkel Motor	1	30.000.000,-
	B Objek Motor	57	50.000.000,-
	C Angkutan Perdesaan	1	48.800.000,-
5	Karyawan/Guru Bantu	2	30.500.000
6	Lain-lain	2	20,000,000

Sumber : Pengisian Kuisisioner dan Metode PRA

Pendapatan rata-rata warga transmigran terbesar karena jenis pekerjaan yang dilakukan sebagai usaha jasa seperti; toko kelontong, bengkel motor, tukang bangunan, dan lain-lainnya hingga mencapai Rp. 63.000.000,- per tahun. Tingkat keragaman penghasilan tersebut menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat di lokasi penelitian belum semuanya dalam kondisi bagus.

Fenomena dari masing-masing indikator yang telah disebutkan diatas diperkuat lagi dari hasil wawancara terbuka dengan responden. Pertanyaan peneliti *"Bagaimana pendapat saudara, apakah setuju dengan adanya program pembinaan usaha tani yang dilakukan selama ini, telah dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan usaha tani transmigran "*.

Dari jawaban responden 62,5 persen menjawab tidak setuju, dengan alasan menurut mereka, program pembinaan usaha ekonomi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal terutama dalam pemanfaatan lahan usaha tani, kenyataan ini bisa dilihat dilapangan masih banyak lahan yang belum diolah atau dimanfaatkan, apalagi sarana dan prasarana ekonomi masih sangat terbatas.

Sedangkan sebanyak 25,5 persen menjawab sangat setuju, dengan argumentasi selama masa pembinaan lebih kurang lima tahun, mereka telah berhasil memanfaatkan lahan usaha, hal tersebut bisa dibuktikan lahan usaha tani sudah bisa ditanami dengan tanaman keras dan tanaman semusim.

Sementara 12 persen menjawab ragu-ragu, alasan mereka karena kondisi lahan yang tidak mendukung, sering banjir, diperparah lagi dengan perilaku transmigran yang tidak serius mengolah lahan usaha secara benar.

Lebih lanjut terhadap pertanyaan " *Apakah saudara setuju Koperasi Unit Desa yang ada berperan mendukung perekonomian masyarakat* ". Mendapat tanggapan miring dari responden , 89 persen menjawab tidak setuju Koperasi Unit Desa mendukung perekonomian masyarakat, karena unit usaha yang ada cuma simpan pinjam dan penjualan pupuk seadanya apalagi pengurunya kurang terbuka.

Sedangkan 8 persen menjawab setuju, karena dengan adanya KUD dapat membantu masyarakat, dalam penyediaan saprotan tidak perlu lagi jauh-jauh membeli ke ibukota kabupaten. Sedangkan sebanyak 3 persen menjawab tidak tahu (wawancara Oktober 2010).

Tanggapan terhadap pertanyaan " *Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap kualitas bantuan yang diberikan selama masa pembinaan dilaksanakan dilokasi ini* ".

Terhadap kualitas bantuan yang diberikan selama pembinaan kepada transmigran dalam mendukung pembinaan usaha ekonomi, medapat tanggapan yang beragam, jawaban yang terbanyak adalah kualitas bantuan yang diterima selama pembinaan 65 persen menjawab sangat baik, 15 persen menjawab baik, 20 persen menjawab kurang baik kualitasnya.

Responden yang memberikan jawaban sangat baik dan baik memberikan alasan bahwa bantuan yang diberikan selama pembinaan kualitasnya dapat dipertanggung jawabkan, hal ini bisa dibuktikan tidak adanya warga yang protes.

Sedangkan responden yang menjawab kurang baik beralasan bantuan bibit/benih pertanian yang disalurkan oleh kontraktor banyak yang hancur dan mati waktu dilansir dan kualitasnya tidak memenuhi standar.

Menurut WD (49 tahun), Tokoh Masyarakat menjelaskan bahwa :

“ Kalau dibandingkan dengan kondisi awal transmigran, maka bantuan yang diberikan memang kurang sempurna, bibit dan benih yang diberikan kurang bermutu, sementara tahun pertama sampai ketiga bibit/benih yang diberikan bagus sehingga hasil yang diperoleh masyarakat meningkat, jadi kalau sekarang mereka terima bantuan kualitasnya kurang bagus kita khawatir hasilnya juga kurang memuaskan (wawancara Nopember 2010).

Pada bagian lain Ibu RZ (32 tahun) tokoh wanita transmigran, menjelaskan bahwa:

“ Beras yang diberikan kepada kami kurang bagus, banyak kotoran dan malah ada kutunya sehingga harus dibersihkan dulu sebelum dimasak (wawancara Nopember 2010).

Tapi berbeda dengan pendapat AG (35 tahun), Ketua Kelompok Tani menjelaskan bahwa :

“ Kualitas bantuannya sudah lumayan, jika dibandingkan dengan masa sebelum menjadi warga transmigran, kami tidak ada yang bantu seperti ini. Bahkan untuk membeli bibit aja harus dibeli dengan harga yang mahal (wawancara Nopember 2010).

Sementara PR (49 tahun) Kabid Program Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk menjelaskan bahwa :

“ Sebenarnya semua bantuan yang akan diberikan kepada transmigran khususnya bibit/benih, jauh hari sudah kita koordinasikan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten bahkan tingkat kecamatan untuk memperoleh informasi akurat komoditi apa yang cocok dengan topografi lokasi yang akan dibantu. Oleh Bidang P2MKT sudah mengantisipasinya melalui pihak rekanan bahwa bibit/benih yang diberikan harus berlabel, jadi sangat tidak mungkin kualitas bantuan yang diberikan kurang baik. Mengenai bantuan beras kemungkinan terlalu lama disimpan di gudang unit, padahal beras yang disalurkan resmi dari Bulog dengan standar layak konsumsi “.

Berdasarkan uraian kondisi Indikator-indikator perkembangan ekonomi tersebut diatas dan hasil pengamatan dilapangan serta hasil penggalian informasi melalui wawancara dengan responden dan informan. Pembinaan usaha ekonomi belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan, ini tercermin dari berbagai indikator tingkat keberhasilan pembinaan usaha ekonomi yang belum mencapai sasaran yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP 06/MEN/1999, tentang Tingkat Perkembangan Permukiman dan Kesejahteraan Transmigran.

2. Pembinaan Sosial Budaya

Pembinaan sosial budaya menyangkut pemberian pelayanan berbagai fasilitas sosial di permukiman transmigrasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesenian, olahraga, dan pembinaan generasi muda serta peranan wanita, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan dan integrasi masyarakat antara transmigran dan penduduk disekitar permukiman transmigrasi sehingga terbina kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling membutuhkan.

Dengan demikian, secara alami akan terjadi proses alkulturasi budaya yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberhasilan pembinaan masyarakat tidak akan terlepas dari adanya kegiatan pembinaan sumberdaya manusia. Kondisi sumberdaya manusia di lokasi penelitian yang dibina meliputi penduduk berkapasitas secara sosial budaya dan perangkat pemerintahan.

Berdasarkan kapasitas secara sosial budaya perlu diketahui potensi tenaga kerja, pendidikan masyarakat, serta kondisi pelayanan masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan berdasarkan kapasitas sebagai perangkat pemerintahan perlu diketahui kondisi kelembagaan yang ada di lokasi penelitian.

a. Penduduk berdasarkan struktur usia

Masyarakat di lokasi penelitian paling banyak usia (15 - 49 tahun) berjumlah 507 jiwa (54,25%), usia (5 - 14 tahun) berjumlah 246 jiwa atau 26,39 % merupakan usia sekolah dan kelompok usia paling sedikit adalah usia (50 - 55 tahun) sebanyak 21 orang (2,25%), selanjutnya kelompok usia 55 tahun keatas sebanyak 43 orang (4,61%), selanjutnya jumlah usia lainnya (0 - 4 tahun) sebanyak 117 orang(12,5%).

Data diatas menunjukkan bahwa usia angkatan kerja cukup tinggi, hal ini merupakan asset terutama dalam penyediaan tenaga kerja.

Kondisi seperti ini memberikan peluang bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengikutsertakan dalam segala bidang pembangunan terutama dalam pelaksanaan program pembinaan sosial budaya.

b. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di lokasi penelitian berkembang dengan baik dengan kondisi gedung SD cukup baik berada di pusat desa, untuk tingkat SLTP dan SLTA berada diluar lokasi, bagi siswa siswi mengalami kesulitan karena jarak tempuh cukup jauh lebih kurang 12 Km, dan memakan waktu relatif lama lebih kurang satu jam, berada di pusat kota kecamatan (Meureuboh), dan membutuhkan biaya relatif mahal untuk transfortasinya, sehingga siswa siswi memilih untuk kost.

c. Pendidikan non formal dan Ketrampilan Kepala Keluarga

Dalam pembinaan ketrampilan masyarakat dilokasi penelitian, pernah diberikan pendidikan non formal/kursus/pelatihan yang diprakarsai oleh Balai Latihan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, maupun Instansi terkait lainnya, Jenis pelatihan/kursus yang diberikan; kursus kelompok Tani sebanyak 32 orang selama 15 hari, pelatihan Pemerintahan Desa sebanyak 2 orang selama 5 hari, Temu Karya sebanyak 100 orang selama 5 hari, dan pelatihan Dai sebanyak 3 orang selama 5 hari.

Dengan adanya pelatihan ini tentu merupakan modal aparat Pembina memanfaatkan tenaga-tenaga yang sudah dilatih untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat lain yang belum memperoleh kesempatan untuk dilatih.

d. Kesehatan

Bangunan sarana dan prasarana kesehatan cukup baik dengan tersedianya bangunan puskesmas di lokasi penelitian, tenaga medis yang menetap di lokasi satu orang, tenaga bidan satu orang. Sesuai data yang dihimpun menunjukkan penyakit yang pernah mewabah adalah ispa, malaria, diare dan TBC, prevalensi penyakit melebihi standar yang ditentukan dalam Kepmentrans dan PPH nomo :Kep 06/MEN/1999, yaitu sebanyak 100 orang. Hal ini menunjukan kondisi kesehatan masyarakat di lokasi penelitian kurang baik.

Untuk melihat lebih jauh tentang pelaksanaan pembinaan sosial budaya yang dilakukan selama ini di lokasi penelitian, terutama di bidang pendidikan. Dari hasil wawancara dengan responden terhadap pertanyaan “ *Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap perkembangan pendidikan di lokasi tempat saudara bermukim saat ini* “.

Dari 20 responden yang diwawancarai melalui pengisian kuisioner, 69 persen mengatakan sangat baik, 20 persen mengatakan baik, sedangkan sisanya 11 persen mengatakan kurang baik.

Dari jawaban yang mengatakan sangat baik/baik mereka beragumen bahwa dilokasi penelitian sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung SD dibangun sangat bagus apalagi peralatan dan perlengkapannya juga sudah tersedia tinggal bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya, ditambah lagi guru yang tersedia sudah cukup memadai.

Bagi yang menjawab kurang baik mereka beralasan bangunan yang tersedia kan cuma bangunan SD saja sedangkan untuk SLTP dan SLTA cuma ada di pusat kecamatan, sehingga sangat menyulitkan bagi anak-anak untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi dan jaraknya cukup jauh dari lokasi, biaya transfortasinya cukup mahal, bagi masyarakat yang mampu mereka terpaksa menyewa rumah kontrakan untuk anak-anaknya.

Berbeda dengan hasil wawancara responden terhadap pertanyaan terdahulu, responden yang dimintai tanggapannya terhadap pertanyaan “ *Dengan hadirnya Program pembinaan melalui pelatihan secara berkelanjutan dapat meningkatkan ketrampilan Transmigran* “. Mendapat respon yang beragam , 55 persen diantaranya merespon dengan pernyataan sependapat, 30 persen menyatakan kurang sependapat, sementara 10 persen tidak sependapat dan 5 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

Dari jawaban mereka menyatakan pendapat bahwa dengan adanya pembinaan melalui pelatihan-pelatihan untuk transmigran di lokasi studi telah meningkatkan pengetahuan sekaligus ketrampilan yang sangat berarti bagi transmigran.

Alasan mereka karena sistem pembinaan melalui pelatihan yang dilakukan secara umum telah menyentuh kepentingan transmigran, dimana proses pembinaan dan pelatihan yang dilakukan sangat baik. Hal ini menurut responden dapat dilihat dari materi yang diberikan selama pelatihan, serta bantuan yang diberikan pasca pelatihan.

Sementara yang memberikan tanggapan kurang sependapat, alasan mereka karena peserta yang dilatih tersebut bukan transmigran yang mampu mentransfer ilmunya kepada transmigran lain, dikhawatirkan warga yang tidak terpilih tidak akan memperoleh imbas dari peserta yang dilatih.

Saran mereka ke depan Pemerintah harus menyeleksi peserta sebelum dilaksanakan pelatihan.

MD (56 tahun) Petani, menyatakan bahwa :

".....Menurut pendapat saya, pelatihan yang dilaksanakan pada dasarnya baik, namun oleh karena peserta yang diikutsertakan bukan transmigran yang pandai maka dikhawatirkan ilmu yang telah diberikan tersebut akan bertahan pada peserta itu saja, dan tidak berbagi ke transmigran lain..."(Wawancara, Nopember 2010).

Pada kesempatan yang sama RD (53 tahun) Ka. UPTD

Pelatihan, menjelaskan bahwa:

" Harapan kita selaku pelaksana pelatihan, semua peserta yang diikutsertakan pada setiap pelatihan haruslah dipilih transmigran yang pandai tulis baca, tokoh masyarakat atau memiliki pengaruh di lokasi tempat tinggal, sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh panitia. Kalau nantinya petugas UPT atau Perangkat Desa menunjuk orang yang tidak sesuai persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini diluar wewenang kami selaku pelaksana di tingkat provinsi...Namun demikian hal ini jarang terjadi, dan tidak semua pelatihan seperti ini....Kami punya standar dan barometer atau indikator untuk setiap pelatihan..".(Wawancara Nopember 2010).

Disisi lain tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuisisioner ***"Sependapatkah saudara pelaksanaan pembinaan kesehatan yang dilakukan selama ini telah membawa dampak terhadap kesehatan transmigran "***.

Dari responden yang ada, 45 persen diantaranya merespon dengan pernyataan sependapat, 45 persen menyatakan kurang sependapat sementara 5% lainnya menyatakan tidak tahu dan 5% sisanya tidak memberikan komentar.

Dari jawaban yang sependapat mereka menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan selama ini di lokasi studi telah membawa dampak terhadap peningkatan kesehatan transmigran walaupun sedikit. Alasan mereka karena pembinaan kesehatan yang dilakukan selama ini dilaksanakan secara profesional, berkelanjutan, terencana dan sistematis. Bahkan mereka berterima kasih atas pembinaan kesehatan yang dilakukan selama ini sehingga dapat mencerdaskan anak-anak transmigran di lokasi penelitian. Sementara yang memberikan tanggapan kurang

sependapat, alasan mereka pembinaan kesehatan yang diberikan itu belum menyentuh kebutuhan masyarakat.

SM (36tahun) Pemuda, menyatakan bahwa :

"....Menurut pendapat saya, pembinaan yang diberikan oleh pemerintah di lokasi UPT kami dengan tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan transmigran, sangat bermanfaat karena kami tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi berobat ke ibu kota kabupaten. Karena pembinaan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan kami, disamping itu kami sendiri dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dilokasi."(Wawancara, Nopember 2010).

Pada kesempatan lain DR.Furqan (45 tahun) Kepala Puskesmas Meureubo Kabupaten Aceh Barat menjelaskan bahwa:

" Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dilokasi transmigrasi, merupakan salah satu program kerja kami, malah untuk lokasi transmigrasi tersebut telah ditempatkan petugas untuk menetap tinggal dilokasi agar mereka selalu siap membantu masyarakat dalam waktu duapuluh empat jam dan apabila ada masyarakat yang tidak bisa ditangani di lokasi akan segera dirujuk ke kecamatan atau kabupaten. Kalau petugas kami, telah dibekali dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai juklak pembinaan dan pelayanan kesehatan."(Wawancara Desember 2010).

Keadaan seperti di atas telah sejalan dengan bunyi Pasal 1 Kepmentrans dan PPH Nomor 06 tahun 1999 yang menyatakan bahwa tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan kondisi perkembangan permukiman dimana kondisi kesehatan masyarakat meningkat yang dibuktikan dari prevalensi penyakit yang terjadi dilokasi permukiman transmigrasi.

3. Pembinaan Bidang Mental Spiritual dan Keagamaan

Pembinaan di bidang mental spiritual diarahkan pada sikap mental yang ulet, tangguh dan mandiri, serta perilaku yang makin baik sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan mental dan spiritual bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kehidupan dan kerukunan umat beragama antar transmigran dan penduduk sekitarnya serta untuk meningkatkan ketagwaan terhadap Tuhan YME. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibangun sarana dan prasarana peribadatan seperti Masjid satu unit, mushollah dua unit dan TPA 3 unit, namun terkendala kurang memadainya peralatan dan perlengkapan.

4. Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintahan

Pembinaan pelayanan masyarakat diarahkan untuk menjamin pelayanan masyarakat yang makin baik, pembentukan kelembagaan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat, yang meliputi lembaga ketahanan Masyarakat Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Untuk itu kerjasama dengan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara lebih intensif agar pada saatnya dapat dibentuk perangkat desa yang defenitif.

5. Pembinaan Kelestarian Lingkungan Hidup

Pembinaan Kelestarian Lingkungan Hidup diarahkan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup di sekitar permukiman Transmigrasi, pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu dilakukan secara arif dan tampa merusak fungsi lingkungan setempat agar usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan. Pemeliharaan kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, transmigran, dan Badan Usaha. Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Tanggapan secara umum terhadap pelaksanaan program pembinaan transmigran yang dilaksanakan di lokasi penelitian selama ini ? mendapat berbagai tanggapan dari responden. Jawaban mereka cenderung beragam, jawaban terbanyak adalah pelaksanaan pembinaan yang mereka rasakan selama ini belum dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, kurang berkesinambungan disamping aparat pembina dan pemangku kepentingan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Data menunjukkan 55% menjawab tidak baik, 25% menjawab kurang baik dan hanya 20% menanggapi dengan jawaban sangat baik prosesnya.

Responden yang memberi tanggapan tidak baik dan kurang baik memberikan alasan bahwa alur proses tahapan pembinaan yang dilaksanakan di lokasi penelitian selama ini kurang berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan, kurang berkesinambungan. Akibatnya banyak kegiatan yang telah di programkan tidak dapat dijalankan sepenuhnya apalagi sikap dan perilaku transmigran yang kurang peduli. Di samping itu petugas pembina sebagian tidak tinggal dilokasi sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat apabila timbul permasalahan yang perlu segera penanganannya, kadangkala bantuan yang disalurkan kerap kali terlambat dari jadwal yang disepakati, sehingga warga transmigran tidak bisa memanfaatkannya tepat waktu dan tepat sasaran.

Demikian pula pembinaan sosial budaya kurang kontinue dilaksanakan oleh petugas. Petugas jarang sekali mengadakan pertemuan dengan warga transmigran untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dalam upaya menencarikan jalan keluar dana upaya tindaklanjutnya, kadangkala masyarakat terpaksa harus turun ke ibukota menyampaikan keluhan-keluhan serta permasalahan yang dihadapi melalui instansi terkait.

Sedangkan responden yang menjawab prosesnya sudah baik beralasan bahwa tahapan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas baik provinsi, kabupaten maupun petugas UPT sudah

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun kurang sempurna dalam pelaksanaannya.

Menurut HH (55) Tokoh Tuha Peut menerangkan bahwa :

"Kalau prosesnya saya tidak tahu persis, karena kami sendiri tidak diberitahu tahapan-tahapan proses pembinaannya oleh petugas. Namun secara umum memang kami disini sering didatangi petugas memberikan bimbingan dan penyuluhan, tapi pak UPTnya tidak tinggal disini, PPL jarang kemari apalagi pak Camat jarang kemari membimbing kami. Jadi wajarlah kalo kami kurang berhasil dalam segala hal, apa itu pertanian maupun sosial budaya.....kami maju karena kami sendiri (Wawancara, Desember 2010).

Pada bagian lain Ibu Nj (43) Pengurus PKK, menjelaskan

bahwa :

"Kami dalam satu tahun ada mendapat bantuan dari PKK Kecamatan Meureubo untuk biaya kegiatan praktek bagi ibu-ibu di sini, tapi kami jarang sekali yang tuntun bagaimana mengelola bantuan itu.... mau *tanyak* sama pak UPT, dia jarang *nginap* di sini, sementara *kalo* siang kami ke ladang, mau tanyak waktu malam pak UPT-nya sudah kembali ke rumahnya di Meulaboh..." (Wawancara, Desember 2010).

Tapi berbeda dengan pendapat GG (45) Petugas kecamatan menjelaskan bahwa :

"Kualitas pembinaannya sudah bagus, hanya tinggal *istiqamahnya* saja, jangan setengah-setengah, harus kontinyu apa per minggu, bulan atau tiga bulanan petugas kabupaten atau kecamatan harus ke sini. Apabila ini diterapkan saya yakin akan timbul rasa memiliki bagi transmigran dan hubungan antara pembina dengan yang dibina akan semakin dekat dan rasa kekeluargaan akan semakin tinggi,"(Wawancara, Desember 2010).

Sementara ASNW (51 tahun) Kabid P2MKT Dinas Tenaga

Kerja Dan Mobiltas Penduduk menjelaskan :

"Pembinaan suatu kawasan transmigrasi tidak hanya beban tugas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh saja, atau Dinsosnakertrans Aceh Barat saja, tetapi semua instansi terkait ikut bertanggung jawab, baik pihak Kabupaten, Kecamatan dan Instansi terkait. Seperti ketersediaan dan keberadaan Petugas PPL, sebenarnya itu tanggung jawab Pemdakab dan Setcam Meureubo untuk menugaskannya ke lokasi transmigrasi. Namun kalau pun ada ketimpangan dalam pelaksanaan prosesi pembinaan di tingkat lapangan, segera dicari jalan keluarnya, sehingga tidak berlarut-larut.

Kami mengakui jika ada beberapa petugas kami yang kurang profesional di dalam melaksanakan tugasnya", (Wawancara, Desember 2010).

Namun demikian berhasil tidaknya program pembinaan di lokasi permukiman transmigrasi tidak hanya tergantung kepada aparatur pembina atau pemerintah saja, juga tidak terlepas dari partisipasi dan peran serta dari masyarakat itu sendiri.

Untuk mengetahui kondisi tersebut peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden" *Bagaimana perhatian atau peranserta masyarakat di lokasi studi terhadap program pembinaan transmigran yang dilaksanakan di Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6..?*

Dari pertanyaan tersebut mendapat jawaban yang hampir bersamaan, sebagian besar responden sekitar 70,25 persen meragukan kesinambungan program tersebut dapat dipertahankan oleh para warga transmigran.

Sebagian lainnya sekitar 25,25 persen menilai bahwa perhatian warga transmigran terhadap pembinaan yang dilaksanakan selama ini sangat antusias dan mengharapkan program serupa dapat dilanjutkan untuk tahun – tahun mendatang.

Sedangkan sisanya 4,5 persen menilai tidak tahu ingin memberikan komentar bagaimana terhadap kondisi mereka pasca pembinaan. Responden yang meragukan terhadap kesinambungan program pembinaan transmigran, menganggap karena kegiatan tersebut hanya dilaksanakan dalam waktu terbatas dan diperuntukkan kepada warga transmigran saja. Sementara masih banyak warga desa sekitar yang berdekatan dengan lokasi studi juga membutuhkan sentuhan pembinaan serupa dari Pemerintah.

Dikhawatirkan kalau hal ini tidak diseimbangkan, akibatnya kecemburuan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari. Oleh karena itu responden sangat mengharapkan ke depan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat dapat melakukan identifikasi secara cermat dan bijaksana sebelum mengirimkan bantuan ke warga transmigran dalam kaitan pelaksanaan pembinaan transmigran

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. HB (54 Thn)

"Sepengetahuan saya, program pembinaan transmigran yang dilaksanakan oleh Pemerintah di UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 Kecamatan meureubo telah mendapat perhatian dari masyarakat yang ada dilokasi transmigrasi dan masyarakat sekitarnya. Perhatian yang dimaksud ada yang bernada positif dan negatif. Pernyataan yang bernada positif, mereka menganggap program ini telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat terutama warga transmigran yang ada di sana dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya, dalam pemenuhan berbagai bantuan pada masa pembinaan. Tetapi perhatian yang bernada negatif juga tidak sedikit.

Mereka beranggapan program ini dinilai sepihak dan tidak adil, karena pada saat penentuan lokasi UPT yang akan di bangun dan selanjutnya dibina seharusnya dilakukan identifikasi atau survey terlebih dahulu untuk menentukan lokasi UPT yang akan ditata. Disamping itu banyak warga desa yang ada di desa sekitar lokasi transmigrasi jauh lebih miskin, mereka lebih butuh bantuan perumahan dan pembinaan lainnya (Wawancara, Nopember 2010).

Pada kesempatan lain, Samsul Bahri (42 tahun) Anggota DPRK, memberikan tanggapannya bahwa :

"Program pembinaan transmigran ini saya nilai baik dan perlu dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, karena sangat menyentuh pada kebutuhan warga transmigran sebagai petani dan warga masyarakat kaum dhuafa. Apalagi kita ini baru saja terlepas dari masa konflik yang berkepanjangan, dimana semua harta benda masyarakat termasuk rumah ikut musnah, jadi dengan adanya program transmigrasi ini telah terpenuhi satu kebutuhan pokok yakni sandang , pangan dan papan" (Wawancara, Desember2010).

Perhatian masyarakat di atas yang dituangkan melalui pernyataan atau penilaian tersebut merupakan jelmaan dari peranserta masyarakat terhadap program pembinaan transmigran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan transmigrasi, secara jelas dinyatakan bahwa peranserta masyarakat dalam program transmigrasi dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga sukarela atau saran tindak lanjut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam mensukseskan pelaksanaan program pembinaan di lokasi transmigrasi,peneliti coba menggali informasi terhadap masyarakat melalui kuisisioner yang disebarakan kepada responden dan wawancara mendalam dengan informan dan tokoh masyarakat dengan pertanyaan peneliti:

" Setujukah anda sebelum dibuat suatu program pembinaan perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu ".

Ditanggapi secara antusias oleh responden. Dari data yang terhimpun, 97 persen responden berpendapat bahwa sangat setuju apabila pemerintah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat atau tokoh masyarakat, sebelum program pembinaan ini dilakukan. Bahkan ada beberapa responden menyarankan agar musyawarah ini dilakukan terhadap semua sektor pembangunan yang akan dilakukan. Karena dengan demikian diharapkan akan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri (wawancara, Nopember 2010).

Lebih jauh AG, (45) Peg. Kantor Camat, mengatakan :

"Selama program pembinaan itu dilaksanakan, kami dari pihak kecamatan kurang dilibatkan secara langsung baik waktu identifikasi, perencanaan, pelaksanaan program maupun evaluasi program. Sehingga kalau ada masalah atau kendala khususnya terhadap warga transmigran dan masyarakat sekitar kami juga tidak mengetahuinya. Akibatnya banyak warga masyarakat yang mengadu kepada kami tentang program tersebut kami tidak mampu memberikan penjelasan. Ini semua karena program pembinaan transmigran tersebut tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak terkait terutama di tingkat kecamatan" (Wawancara Desember 2010).

Namun ketika dikonfirmasi kondisi ini kepada pejabat berwenang di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, PR (49 tahun) selaku Kabid program dan Pelaporan menjelaskan bahwa :

"Keterlibatan masyarakat dalam program transmigrasi dan pembinaan transmigran di dalamnya ini telah diwujudkan dalam rapat perangkat desa dengan pihak kecamatan dan dinarasikan dalam bentuk hasil rembung desa. Sehingga tidak benar kalau masyarakat tidak mengetahui program ini, termasuk Camat karena pak Camat pun harus hadir atau paling tidak ikut menandatangani hasil rembung desa tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke Bupati dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten sesuai dengan tatacara persyaratan pengajuan atau pengusulan program pembangunan kawasan transmigrasi" (Wawancara, Desember 2010).

Mendengar beberapa jawaban responden terhadap peranserta masyarakat dalam pembangunan, khususnya langkah-langkah pembinaan transmigran di Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6, sangat dapat kita akui kebenarannya. Karena selama ini masyarakat dalam kegiatan pembangunan tidak secara langsung dilibatkan oleh pemerintah.

Pada hal kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1997 Bab X tentang Peranserta Masyarakat secara jelas dinyatakan pada pasal 35 yang berbunyi :

1. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan transmigrasi;
2. Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha;

3. Pemerintah mendorong dan berkewajiban memberikan kemudahan kepada perseorangan, kelompok dan badan usaha untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transmigrasi;
4. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan operasional untuk perseorangan, kelompok masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menjelaskan lebih rinci tentang peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi. Pada pasal 59 ayat (2) dijelaskan bahwa peranserta masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi dapat berbentuk (a) Sumbangan pemikiran atau informasi, (b) Temuan-temuan teknologi terapan, (c) Jasa pelayanan, (d) bantuan lembaga sosial untuk penyuluhan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan. Disamping parameter yang telah disebutkan diatas peneliti juga ingin melihat apakah juga terjadi transformasi sumber daya manusia dan alih teknologi di antara transmigran dengan Pembina peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dan informan :

“ Apakah anda setuju program pembinaan memberikan efek terjadinya transformasi SDM dan Alih Teknologi di antara transmigran dengan Pembina “

Secara umum responden berpendapat setuju program pembinaan memberikan efek terjadinya transformasi SDM dan Alih Teknologi antara transmigran dan pembina. Hal ini disebabkan karena warga yang dibina merupakan warga transmigran yang mendiami lokasi UPT tersebut, sehingga tingkatan SDM dan teknologi yang dimiliki antara responden dengan pembina lapangan mempunyai nilai dan strata yang berbeda. Dengan demikian manakala proses pembinaan berlangsung maka akan terjadi transformasi ilmu pengetahuan dari pembina ke transmigran.

Hal ini diakui, sebagaimana yang diungkapkan oleh JU (56 tahun) Petani transmigran saat diwawancarai oleh peneliti, menerangkan bahwa :

"....Akan dengan mudah terjadinya transformasi SDM dan teknologi di lokasi UPT tersebut, karena warga yang dimukimkan di lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6 adalah warga transmigran yang telah mengenyam pendidikan walaupun hanya tingkat SMP, sehingga akan mudah bagi mereka untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para pembina, hanya saja untuk kesinambungannya perlu dukungan lain seperti modal kerja, ini yang mereka tidak punya...." (Wawancara, Nopember 2010).

B. Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran

Unit Pemukiman Transmigrasi SP6 Alue Penyareng telah memasuki masa binaan lebih lima tahun (tahap pengembangan), Perkembangannya akan dianalisis menggunakan kriteria yang diatur dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP.06/MEN/1999, Tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran. Keputusan tersebut menyoroti analisis perkembangan dari parameter Ekonomi, Sosialbudaya, Integrasi Sosial dan Keaktifan Lembaga Desa. Keempat parameter tersebut beserta indikator pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Parameter Ekonomi

Parameter Ekonomi meliputi variabel pendapatan, pemertaan, ketenagakerjaan, kontribusi permukiman transmigrasi, keberhasilan koperasi unit desa atau tempat pelayanan koperasi, diukur dengan indikator pendapatan per KK pertahun, gini ratio, ratio setengah pengangguran, ratio pendapatan per kapita kabupaten, serta rentabilitas dan tingkat pelayanan koperasi unit desa.

a. Pendapatan

Pendapatan Transmigran merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan transmigran di daerah transmigrasi. Sebagai gambaran umum pendapatan transmigran di lokasi unit pemukiman transmigrasi SP 6 Alue Penyaring, pada umumnya berasal dari sektor

pertanian dari hasil tanaman pangan, sedangkan sumber pendapatan dari luar sektor pertanian berasal dari usaha dagang, buruh bangunan dan jasa-jasa industri rumah tangga. Pendapatan masyarakat dari hasil pertanian dan usaha lainnya, rata-rata pendapatan yang diukur dan dikonversikan dalam harga beras.

Dari hasil perhitungan tingkat pendapatan masyarakat dari hasil pertanian dan usaha lainnya melalui pengisian kuisioner terhadap 20 orang responden yang mewakili, diperoleh data bahwa rerata tingkat pendapatan masyarakat di lokasi penelitian sebesar Rp. 13.250.000 s/d Rp. 19.850.000 per tahun atau sebesar Rp. 1.104.600 s/d Rp. 1.654.700 per bulan, harga beras di lokasi Rp.8.500 per kilogram, setara dengan 1.558 Kg beras s/d 2336 Kg beras per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Rerata Tingkat Pendapatan Transmigran

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI FAKTUAL
1	Pendapatan	Rp./KK	Rp13.250.000 s/d 19.850.000 per tahun atau sebesar Rp. 1.104.600 s/d 1.654.700 per bulan, harga beras di lokasi Rp. 8500/Kg setara 1.558 Kg beras s/d 2336 Kg beras /tahun
2	Prosentase Transmigran Miskin	Orang	-
3	Prosentase Keluarga Miskin	KK	-
4	Tingkat Pelayanan KUD	3 Orang	Belum berkembang baik karena terbatasnya modal dan kurangnya pembinaan dari dinas-dinas terkait.

Sumber : Pengisian Kuisioner dan Metode PRA

Informasi rerata tingkat pendapatan warga di lokasi penelitian tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan responden sampel terpilih sebanyak 10 % dari jumlah KK yang ada, yaitu sebanyak 200 KK melalui kuisisioner tingkat pendapatan. Dari table diatas terlihat bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan rata-rata masyarakat sangat bervariasi, karena pendapatan warga selain dari usaha tani juga berasal dari usaha jasa (toko kelontong, bengkel sepeda motor, dagang dan usaha sampingan lainnya). Tingkat keragaman yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa taraf hidup transmigran belum semuanya dalam kondisi mantap.

Dilihat dari hasil rata-rata pendapatan transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi SP 6 Alue Penyaring apabila dikaitkan dengan Kep Men Trans dan PPH Nomor KEP. 06/MEN/1999, tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi Dan Kesejahteraan Transmigran.

UPT Alue Peunyareng SP 6, belum memenuhi syarat karena lokasi tersebut sudah masuk tahap Pengembangan, seharusnya rata-rata pendapatan warga \geq 3.000 Kg beras/Tahun/KK. Akibat rendahnya pendapatan, transmigran mengalami kesulitan untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki secara maksimal, hal ini dengan sendirinya akan membawa dampak terhadap perkembangan ekonomi unit pemukiman transmigrasi yang pada akhirnya keberhasilan sasaran pembinaan sulit untuk diwujudkan.

b. Pemerataan

Pemerataan didekati dengan Indikator Gini Ratio yaitu ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan sejumlah kelas pendapatan Gini Ratio. Dari data-data penghasilan warga UPT Alue Peunyareng yang kemudian diurutkan berdasarkan besarnya pengeluaran secara Ascending kemudian dikelompokkan berdasarkan besarnya pengeluaran tersebut dalam 12 kelompok Perhitungan. Gini Ratio pada UPT Alue Peunyareng SP 6. Dapat dilihat dalam Lampiran. Rumus untuk menghitung gini ratio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

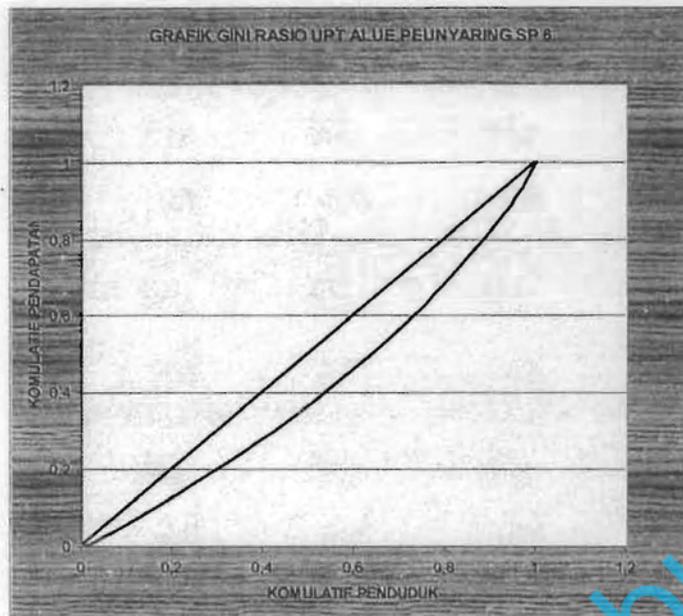
dengan: P_i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Maka $G = 1 - 0,81606429 = 0,18393571$,

Gini rasio masuk dalam kriteria ketimpangan rendah dan memenuhi Kepmenrans dan PPH Nomor KEP. 06/MEN/1999 tanggal 4 Februari 1999 yaitu $< 0,25$, Kurva Gini Rasio di UPT Alue Peunyareng SP 6 dapat di lihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 : Grafik Gini Rasio UPT IV SP-6 Alue Peunyareng



Kondisi seperti ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian : "Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran / pemukim dan masyarakat sekitar, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa"

c. Kontribusi Permukiman Transmigrasi

Kontribusi Permukiman Transmigrasi didekati dengan ratio pendapatan per kapita transmigran terhadap pendapatan per kapita Kabupaten. Total penghasilan , dari jumlah KK yang ada di UPT Alue Peunyareng SP 6 = 200 KK x Rp.19.850.000 = Rp.3.970.000.000. PDRB Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 senilai = Rp. 1.127.249.902.000.

Dengan sendirinya kontribusi pemukiman transmigrasi UPT Alue Peunyareng = $3.970.000.000$ dibagi $1.127.249.902.000$ dikali $100 = 0,352\%$. Apabila kita lihat dari total penghasilan tersebut, maka kontribusi pemukiman transmigrasi Alue penyaring terhadap PDRB Kabupaten Aceh barat, masih sangat jauh dari memenuhi standar Kep Men Trans dan PPH Nomor KEP. 06/MEN/1999 tanggal 4 Februari 1999 yaitu sebesar $1,1\%$.

d. Keberhasilan Koperasi Unit Desa

Keberhasilan Koperasi Unit Desa didekati dengan indikator rentabilitas dan tingkat pelayanan. Di Unit Pemukiman Transmigrasi SP 6 Alue Peunyareng telah terbentuk KUD dengan nama “Jasa Kreung Tujuh.” Berdiri tanggal 26 Juli 2005 dan sudah berbadan hukum nomor : 368/BH/KOP.1.6./III/2006. Saat ini masih aktif tetapi hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam dan pengadaan saprotan. Aktivasnya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan kekurangan modal dan sarana pendukung lainnya, tingkat kesadaran berkoperasi masih rendah, organisasi dan tata laksana administrasi belum berfungsi sehingga KUD belum berperan secara aktif mendukung perekonomian masyarakat.

Berdasarkan fakta dan data tersebut diatas. Ditinjau dari indikator pendapatan, kesejahteraan ekonomi masyarakat dilokasi penelitian tergolong kurang baik, mempunyai tingkat pendapatan (kg setara beras) dibawah standar bina (3000 kg setara beras/KK/tahun).

Demikian pula dengan rasio pendapatan transmigran terhadap kabupaten, mempunyai pendapatan per kapita lebih rendah dari pendapatan per kapita kabupaten, artinya kontribusi UPT terhadap pendapatan kabupaten sangat rendah. Indikator Rentabilitas dan Tingkat pelayanan KUD, berada pada tingkat pelayanan yang rendah. KUD di lokasi penelitian belum bisa memeberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggotanya.

2. Parameter Sosial budaya

Parameter sosial budaya meliputi variabel kebetahan, keamanan, pendidikan, kesehatan dan KB, partisipasi masyarakat transmigran, diukur dengan indikator transmigran meninggalkan lokasi, perbuatan tindak kejahatan/pelanggaran, angka partisipasi pendidikan, prevalensi penyakit, rasio kematian balita, rasio anak balita, gotong royong perbaikan fasilitas lingkungan, dan kerjasama kelompok tani.

a. Kebetahan

Kebetahan transmigran didekati dengan Indikator transmigran meninggalkan lokasi, yaitu persentase transmigran yang meninggalkan lokasi dalam satu tahun terakhir, dibandingkan dengan realisasi penempatan transmigran dikali 100%. Berdasarkan data perkembangan UPT dan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh data yang meninggalkan lokasi sebanyak 2 Kepala Keluarga. Dengan sendirinya persentase meninggalkan lokasi = $2 : 200 \times 100 \% = 1\%$. Memenuhi standar yang ditetapkan menurut Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Nomor : KEP/06/1999, sebesar 2 %.

b. Keamanan (Perbuatan Melawan Hukum)

Keamanan (Perbuatan Melawan Hukum), didekati dengan Indikator frekuensi terjadinya tindak kriminalitas dalam setahun. Yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, masalah tanah dan pemerasan.

Data yang diperoleh dari data perkembangan UPT dan hasil wawancara dengan responden di lokasi penelitian selama satu tahun terakhir ini tidak pernah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, hal ini menunjukkan bahwa dilokasi studi masyarakat merasa aman untuk melakukan aktifitas, ini akan menimbulkan rasa percaya diri masyarakat dalam berusaha mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

c. Pendidikan

Pendidikan didekati dengan Indikator angka partisipasi pendidikan, yaitu persentase penduduk usia SD dan SLTP yang sedang bersekolah (7–12 tahun), sedang bersekolah SD dan penduduk usia (13–15 tahun) sedang bersekolah SLTP.

Angka Partisipasi Pendidikan yaitu Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD-SLTP yang sedang bersekolah dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD-SLTP dikali 100 % = 95 %, memenuhi standar Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH R I Nomor : KEP/ 06/MEN/1999, yaitu sebesar 80 %.

d. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kesehatan dan Keluarga Berencana didekati dengan Indikator prevalensi penyakit, ratio kematian balita dan ratio anak balita dengan wanita. Data dilapangan menunjukkan prevalensi penyakit = jumlah penduduk sakit dalam satu tahun terakhir (130 orang), dibagi dengan jumlah penduduk (931 orang), dikali 1000 = 139 orang, standar Kepmentrans dan PPH Nomor : KEP 06/MEN/1999, sebanyak 80 orang, ini menunjukkan dilokasi penelitian prevalensi penyakit cukup tinggi, bearti tingkat kesehatan masyarakat masih rendah.

e. Partisipasi Masyarakat Transmigran

Partisipasi masyarakat transmigran didekati dengan Indikator gotong-royong perbaikan fasilitas umum dan kerja sama kelompok. Dalam hal gotong-royong, transmigran memberikan partisipasinya dalam bentuk gotong-royong untuk memelihara sarana/fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk kepentingan transmigran. Dilokasi penelitian ditemukan kondisi jalan poros dalam bentuk pengerasan dengan sirtu, jembatan dijalan penghubung rusak, lapangan olah raga tidak terawat, bangunan fasilitas umum seperti Balai Desa, Gudang Unit, Kantor UPT, Rumah Petugas dalam keadaan kurang terawat. Banyaknya sarana dan prasarana fasilitas umum yang kurang terawat mencerminkan partisipasi/gotong-royong di lokasi penelitian kurang baik.

Dari Parameter Sosial Budaya, data menunjukkan kebetahan mempunyai nilai indikator kebetahan tinggi, artinya jumlah transmigran yang meninggalkan lokasi sedikit (2 KK). Partisipasi pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lokasi penelitian pada umumnya cukup berhasil, memiliki angka partisipasi pendidikan baik. Prevalensi penyakit menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat cukup tinggi berarti tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Berbagai fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah banyak yang rusak mencerminkan partisipasi/gotong royong yang kurang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan sosial budaya di lokasi penelitian kurang baik.

3. Parameter Integrasi Sosial

Parameter integrasional didekati dengan variabel/indikator tingkat komplik SARA, yaitu frekuensi terjadinya komplik SARA dalam satu tahun terakhir.

Kriteria kondisi seperti disebutkan, di lokasi penelitian UPT IV SP 6 Alue Penyareng, berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informan yang ada di lokasi, tidak pernah ada komplik sara, sehingga terlihat jelas kehidupan dan kerukunan umat beragama antar warga transmigran dengan penduduk setempat sangat bagus sekali, kenyataan tersebut memenuhi standar Kepmentrans dan PPH Nomor : KEP 06/MEN1999, yang menetapkan frekuensi terjadinya komplik SARA dalam setahun maksimal dua kali.

Dari data Parameter Integrasi Sosial menunjukan tidak ditemukan adanya komplik sosial yang berarti, ini membuktikan integrasi masyarakat di lokasi penelitian pada umumnya sudah baik.

4. Parameter Keaktifan dan Pelayanan Lembaga Sosial

Parameter keaktifan dan pelayanan lembaga sosial didekati variable tingkat keaktifan lembaga sosial dan pelayanan.

a. Keaktifan lembaga sosial

Keaktifan lembaga sosial didekati dengan indikator tingkat keaktifan perangkat pemerintahan desa yang dicerminkan oleh persentase warga yang memiliki KTP.

Di lokasi penelitian diperoleh data hampir semua penduduk yang berusia diatas 17 tahun belum memiliki KTP. Belum memenuhi standar yang ditetapkan sebesar 80 %.

b. Pelayanan

Pelayanan didekati dengan indikator kemampuan pelayanan aparat desa yang dicerminkan oleh persentase warga yang mengeluh pelayanan aparat desa. Data yang diperoleh dilapangan dan hasil wawancara dengan responden dan informan, banyak warga yang mengeluh terhadap pelayanan, apalagi petugas Pembina tidak tinggal dilokasi, sangat sulit bagi warga dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi, kenyataan seperti ini tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu persentase yang mengeluhkan pelayanan aparat sebesar 5 % , pada Tahap Pengembangan.

Data menunjukkan pada umumnya tingkat keaktifan aparat desa masih rendah, yang diindikasikan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP setempat, serta kemampuan pelayanan aparat desa dan Pembina kurang baik, yang diindikasikan banyak keluhan dari masyarakat terhadap kinerja aparat pembina.

Berdasarkan data tersebut diatas, setelah dilakukan analisis laju perkembangan permukiman transmigrasi, berdasarkan parameter ekonomi, sosial budaya, integrasi sosial, dan kemampuan pelayanan lembaga sosial, meliputi sembilan belas indikator, Perkembangan Permukiman Transmigrasi UPT IV SP6 Alue Penyareng, belum berkembang dengan baik, karena belum mencapai sasaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Keputusan Menteri Transmigrasi Dan PPH Republik Indonesia Nomor : KEP 06/MEN/1999, pasal 1 ayat 3, mengatakan kondisi perkembangan permukiman transmigrasi pada tahap pengembangan. Transmigran telah mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakat, dalam bentuk partisipasi aktif, guna mengembangkan usaha dan kehidupan secara berkelanjutan.

C. Kendala yang dihadapi

Setelah diuraikan kondisi eksisting Unit Permukiman Transmigrasi Sp 6 Alue Penyareng sebagaimana diuraikan sebelumnya, informasi selanjutnya adalah penggalian informasi Unit Permukiman Transmigrasi dari kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Yaitu penggalian informasi dan kondisi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Melalui metode ini dapat diketahui berbagai kendala yang menyebabkan Unit Permukiman Transmigrasi tersebut belum mencapai perkembangan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan RI Nomor : KEP 06 /MEN/ 1999. Dari hasil pengamatan lapangan dan hasil penggalian informasi, secara rinci diperoleh informasi kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia

Lokasi penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, penempatan awal dilaksanakan pada tahun 2004 sebanyak 200 KK (935 jiwa), terdiri dari masyarakat pengungsi sebanyak 100 KK. Dan masyarakat Dhuafa sebanyak 100 KK. Melihat dari komposisi masyarakat yang ditempatkan sepintas terlihat adalah masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun ilmu pengetahuan, apalagi jarak tempat tinggal masyarakat yang ditempatkan tersebut dengan desa asalnya cuma berjarak lebih kurang enam kilometer. Kenyataan tersebut merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh aparat Pembina dalam melaksanakan tugasnya, mereka sering pulang ke desa semula, dengan keterbatasan pendidikan juga menjadi hambatan dalam melaksanakan setiap program yang dicanangkan, partisipasi masyarakat rendah, kadangkala bantuan yang diberikan sering dijual sehingga tujuan program tidak mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2. Sumber daya fisik lahan

Kondisi fisik lahan di lokasi penelitian di dominasi oleh jenis tanah Gleisol Histik, Kambisol Distik dengan tingkat kesuburan tanah rendah sampai sedang, tingkat keasaman tinggi 4,4 – 5,5 . Untuk kelangsungan usaha tani perlu dilakukan perbaikan tingkat kesuburan dan menaikkan pH tanah melalui pemupukan, pengapuran, dan pemberian bahan organik. Upaya ini sekaligus dapat memperbaiki sifat fisik/struktur tanah. Disisi lain Lahan Usaha Satu, pada musim hujan sering banjir dikarenakan system drainase yang kurang baik, diperparah lagi banyaknya hama babi yang sulit dikendalikan. Begitu juga dalam pemanfaatan lahan usaha oleh masing-masing kepala keluarga persentase sedikit sekali dari jumlah lahan yang dibagikan seluas 180 ha, masyarakat baru mampu mengusahakan seluas 97 ha.

3. Sarana dan Prasarana

Jalan Poros sepanjang 1,5 Km, jalan Desa 3,5 Km dan jalan penghubung 4,5 Km, masih dalam tingkat pengerasan pada waktu musim hujan sulit untuk dilalui. Lokasi penelitian karena tanahnya gambut sehingga banyak membutuhkan pembuatan jembatan dan gorong-gorong, kondisi saat ini dalam keadaan rusak sehingga menyulitkan bagi masyarakat dalam hal hubungan transportasi baik untuk memasarkan hasil atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga sangat menyulitkan bagi petugas pembina untuk memaksimalkan pembinaan terhadap transmigran.

Sarana air bersih berasal dari 50 buah sumur gali dan 2 buah sumur bor dimanfaatkan oleh 4 KK/unit, sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan fasilitas umum yang tersedia seperti Gudang Unit, Kantor UPT, Balai Desa, rumah petugas dalam keadaan rusak mengindikasikan partisipasi masyarakat dalam bergotong-royong kurang baik.

4. Sosial Budaya

Dalam pelayanan pendidikan terkendala bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP dan SLTA karena belum tersedia di lokasi penelitian.

Sehingga bagi keluarga yang kurang mampu terpaksa anak-anaknya tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Begitu juga untuk tingkat Taman Kanak-kanak belum tersedianya sarana dan prasarana permainan anak dan kelengkapan peralatan mengajar. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan masih terkendala jauhnya puskesmas yang saat ini cuma ada di kecamatan yang berjarak lebih kurang 12 Km dan untuk sampai ketujuan memerlukan ongkos lebih kurang Rp. 50.000. Dalam hal pembinaan mental spiritual rendahnya kegiatan rohaniwan, terbatasnya kader-kader dalam bidang keagamaan serta kurang tersedianya buku-buku keagamaan.

5. Perekonomian dan Pertanian

Produksi pertanian hasilnya belum memuaskan, kendala yang ditemui terbatasnya modal usaha tani untuk pengadaan pupuk, bibit-bitan dan saprodi, keuletan masyarakat dalam mengolah lahan belum terlihat menunjukkan hasil, kelompok tani yang sudah terbentuk belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga petani dalam mengolah lahan tidak berkelompok. Penyediaan fasilitas sarana secara standar telah berinflikasi pada rendahnya perkembangan ekonomi karena pengembangan usaha tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi. Ditambah lagi kebijakan transmigrasi selama ini hanya berorientasi pada target kuantitatif dan kurang memperhatikan kompetensi transmigran, kesesuaian kultur dan kelayakan lahan.

6. Kelembagaan Ekonomi

Keberadaan Koperasi Unit Desa belum berperan secara aktif mendukung perekonomian masyarakat, dikarenakan tingkat kesadaran berkoperasi rendah, modal terbatas, organisasi dan tata laksana administrasi belum berfungsi serta unit usaha belum berkembang.

7. Integrasi Sosial

Integrasi masyarakat dengan penduduk sekitarnya berlansung relatif lamban, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang karestik sosial budaya satu sama lain.

Pembangunan permukiman transmigrasi yang eksklusif dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya telah menimbulkan kecemburuan sosial yang mudah menyulut konflik antar kelompok di masyarakat.

8. Kelembagaan UPT dan Pemerintahan

Keterbatasan tenaga Pembina Unit Pemukiman Transmigrasi di lokasi penelitian tersedia cuma dua orang sedangkan tingkat pendidikan petugas Pembina yang ada di lokasi pada tingkatan SMA, sehingga menyulitkan dalam mengimplementasikan suatu program yang sudah ditetapkan kepada masyarakat. Dalam hal organisasi pemerintahan desa sangat dirasakan rendahnya intensitas kegiatan, rendahnya sumberdaya manusia yang menangani organisasi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas hasil penelitian menunjukkan kendala umum yang dihadapi di lokasi penelitian selama masa pembinaan adalah kondisi lahan yang kurang layak usaha, komoditas pertanian dan sarana produksi yang dibagikan kurang sesuai dengan kondisi fisik lahan, aksesibilitas yang kurang memadai, kelembagaan ekonomi yang kurang berfungsi, kompetensi aparat Pembina yang memenuhi standar bina sehingga menyulitkan dalam penerapan kegiatan pembinaan dilapangan. Kondisi tersebut merupakan suatu kendala yang harus dibenahi untuk masa-masa yang akan datang dalam mewujudkan sasaran akhir pembinaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dan berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Program Pembinaan terhadap warga transmigrasi dilokasi Unit Pemukiman Transmigrasi SP6 Alue Penyaring yang dilakukan selama lebih kurang lima tahun masa pembinaan transmigran belum mampu berdiri sendiri, dalam arti belum mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan, permukiman transmigrasi belum berubah menjadi sebuah desa yang mandiri. Hal ini diduga karena kurang berjalannya fungsi dari transmigran, aparat lapangan, stimulan yang diberikan belum optimal dimanfaatkan, pelaksanaan belum dilakukan secara komprehensif, saling terkait dan berkesinambungan, sehingga hasil yang diperoleh belum mencapai sasaran yang diharapkan.
- b. Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran di lokasi penelitian dikaitkan dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI Nomor: KEP 06/MEN/1999. Setelah dilakukan penelitian berdasarkan parameter dan indikator pengukuran perkembangan permukiman dan kesejahteraan transmigran yang diperlihatkan dengan membandingkan antara kondisi permukiman dengan standar pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Lokasi Permukiman Transmigrasi SP 6 Alue Penyareng diukur dari laju kecepatan perkembangan permukiman transmigrasi. Hasil perhitungan dengan nilai skor belum mencapai 60 %. Maka lokasi penelitian termasuk kategori kurang berkembang. Dilihat dari Tingkat Kesejahteraan Transmigran Rata – Rata pendapatan transmigran sebesar Rp.19.850.000 per tahun setara 2.336 Kg beras per tahun per KK. Sesuai Tahap pembinaan lokasi penelitian baru mampu menduduki tingkat **Tahap Pemantapan (Plus)** menuju tingkat **Tahap Pengembangan**. Belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepmentrans dan PPH Nomor KEP. 06/MEN/1999. Sedangkan UPT Alue Peunyareng SP 6 sudah memasuki akhir tahun kelima pembinaan atau **Tahap Pengembangan** seharusnya rata-rata pendapatan warga ≥ 3.000 .Kg beras/Tahun/KK.

- c. Selama masa pembinaan kurang lebih lima tahun di laksanakan kendala yang ditemui secara umum adalah kurang berjalannya fungsi dari transmigran dan aparat pembina, tingkat kesuburan tanah yang rendah(tanah gambut), banyaknya hama yang mengganggu tanaman, terbatasnya pengusaha lahan, modal dan peralatan pertanian yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, lahan usaha dua sebagian masih sengketa dengan masyarakat, lembaga ekonomi belum mampu mendukung perekonomian masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas berdampak terhadap rendahnya nilai ekonomis yang dihasilkan transmigran dengan sendirinya akan menghambat suatu lokasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam mempercepat peningkatan mutu kehidupan tranmigran sesuai dengan sasaran tahapan pembinaan.

2. Saran

- a. Dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap transmigrans, dimasa yang akan datang perlu diberdayakan sumberdaya manusia, sumberdaya alami dengan melibatkan unsur terkait dan masyarakat itu sendiri agar berperan aktif dalam setiap kegiatan sehingga mutu pembinaan lanjutan pasca berakhirnya masa pembinaan dapat lebih meningkat, terutama diarahkan untuk pencapaian keberhasilan Transmigrans agar mampu dan mempunyai kekuatan sendiri dalam membangun keluarganya.
- b. Untuk Mencapai Tingkat Perkembangan Permukiman Dan Kesejahteraan Transmigran. Starategi alternatif yang paling tepat untuk menjamin keberlanjutan peningkatan pengelolaan lahan usaha transmigran melalui penyediaan sarana dan prasaran , peningkatan ketrampilan transmigran, memfungsikan lembaga ekonomi dan pembukaan lahan usaha dengan pola kemitraan merupakan pilihan yang cukup baik dalam mendukung peningkatan pendapatan transmigran serta penyelesaian sengketa lahan usaha dua supaya masyarakat transmigran dapat menjalankan usaha dan mengembangkan potensi dirinya lebih optimal.
- c. Terhadap Kendala yang dihadapi untuk pembinaan lebih lanjut agar ditingkatkan pembinaan di segala bidang, dengan melibatkan seluruh unsur terkait dalam menumbuh kembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan social budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Solihin, Abdul Wahab. (2001). *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kismartini, Listyodono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sonny Harry B, Harmadi. (2008). *Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- , (1997). *Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW.
- Azawar, S. (1998). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daldjoeni, N. (1997). *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni Bandung.
- Dharmesta. (1992). Metode Penelitian Sikap dan Perilaku Konsumen, *Jurnal Kelola, Nomor 2 Volume 4, 1992, 85 – 103*.
- Dye TR. (1994). *Understanding Publik Policy (terjemahan) New Jersey*. Yogyakarta: PT. Hanin Dita Graha Widy.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1978, *tentang Penetapan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Penerima Transmigrasi*.
- Moloeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mirwanto, M. (2003). *Mengenal dan Memahami Transmigrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Nurdin. (1999). *Perkembangan Desa-desa di sekitar PIR Perkebunan (PIR-BUN), Studi Kasus di Kabupaten Pasir, Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Transmigrasi*.

- Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP 06/MEN/1999 tentang *Tingkat Perkembangan Permukiman Dan Kesejahteraan Transmigran*.
- Riyadi, Suprpto. (2000). *Perencanaan Evaluasi Publik*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- (2000). *Evaluasi Kebijakan Publik Suatu Pendekatan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Siagian, Sondang P. (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suparno, Erman. (2007). *Paradigma Baru Transmigrasi*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang *Ketransmigrasian*.
- Zakaria Palisungan. (1996). *Interaksi Antara Transmigran dan Penduduk Asli: Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ruang Kawasan. Studi Kasus UPT SP 2 Desa Legare Jaya Kecamatan Napa Kabupaten Nabire Irian Jaya*. Yogyakarta: Thesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada.
- SAGI. (2006). *Bunga Rampai Transmigrasi. Solusi Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia*.
- (2009). *Analisis Pengukuran Kinerja Pembangunan Transmigrasi, Pusat Data Dan Informasi, Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan Dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- (2009). *Laporan Akhir Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi UPT Bina, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- (2010). *Evaluasi Pembangunan Transmigrasi, Pusat Data Dan Informasi, Ketransmigrasian Badan Penelitian Pengembangan Dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Fatimah Siti, dkk (2010). *Faktor Pendukung dan Fenomena Keberhasilan Penyelenggaraan Transmigrasi*, Penerbit Bangkit Daya Insana.

Lampiran I

DAFTAR KUISIONER

- Umur : Tahun
- Alamat :
- Petunjuk : Bacalah semua pertanyaan di bawah ini dengan baik dan pilihlah salah satu jawaban, dengan cara *memberi tanda silang (x)* pada setiap jawaban yang paling tepat menurut anda.
-

I. Identitas Responden

1. Kalau boleh diketahui, apa pendidikan tertinggi Saudara ?

a. SD/MI	b. SMP/MTsN	c. SMA/MAN
d. Sarjana Muda	e. Diploma/D3	f. Sarjana

2. Sebutkan jenis pekerjaan Saudara sehari-hari :

a. Petani	b. Wiraswasta	c. Pedagang
d. PNS	e. Pensiunan	f. Lain-lain

3. Saudara sebagai warga transmigran telah menetap di lokasi UPT IV Alue Peunyarang Sp 6 selama :

a. 1 Tahun	b. 2 Tahun	c. 3 Tahun
d. 4 Tahun	e. 5 Tahun	f. 6 Tahun

II. Program Pembinaan

1. Bagaimana pendapat saudara, apakah setuju dengan adanya program pembinaan usaha tani yang dilakukan selama ini, telah dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan usaha tani transmigran?

a. Sangat setuju	b. Setuju	c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju	e. Sangat tidak setuju	f. Tidak tahu

2. Apakah saudara setuju Koperasi Unit Desa yang ada berperan mendukung perekonomian masyarakat?

a. Sangat setuju	b. Setuju	c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju	e. Sangat tidak setuju	f. Tidak tahu

3. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap kualitas bantuan yang diberikan selama masa pembinaan dilaksanakan di lokasi ini?

a. Sangat Baik	b. Baik	c. Kurang Baik
d. Tidak Baik	e. Tidak tahu	

4. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap perkembangan pendidikan di lokasi tempat saudara bermukim saat ini?

a. Sangat Baik	b. Baik	c. Kurang Baik
d. Tidak Baik	e. Tidak tahu	

5. Dengan hadirnya Program pembinaan melalui pelatihan secara berkelanjutan dapat meningkatkan ketrampilan Transmigran?

a. Sangat sependapat	b. Sependapat	c. Ragu-ragu
d. Kurang sependapat	e. Tidak tahu	

6. Sependapatkah saudara pelaksanaan pembinaan kesehatan yang dilakukan selama ini telah membawa dampak terhadap kesehatan transmigran

a. Sangat Sependapat	b. Sependapat	c. Ragu-ragu
d. Tidak sependapat	e. Sangat tidak sependapat	f. Tidak tahu

7. Bagaimana perhatian atau peranserta masyarakat di lokasi studi terhadap program pembinaan transmigran yang dilaksanakan di Lokasi UPT IV Alue Peunyareng Sp 6?

a. Sangat Baik	b. Baik	c. Kurang Baik
d. Tidak Baik	e. Tidak tahu	

8. Setujukah anda sebelum dibuat suatu program pembinaan perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu?

a. Sangat setuju	b. Setuju	c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju	e. Sangat tidak setuju	f. Tidak tahu

9. Apakah anda setuju program pembinaan memberikan efek terjadinya transformasi SDM dan Alih Teknologi diantara transmigran dengan Pembina?

a. Sangat setuju	b. Setuju	c. Ragu-ragu
d. Tidak setuju	e. Sangat tidak setuju	f. Tidak tahu

Terima kasih atas bantuan Saudara yang telah bersedia ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian saya ini, semoga hasilnya kelak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh para pengambil kebijakan publik untuk kesempurnaan pelaksanaan program ketransmigrasian umumnya dan pembinaan transmigran khususnya.

Lampiran II

**KUESIONER
PERKEMBANGAN PEMUKIMAN DAN
KESEJAHTERAAN TRANSMIGRASI**

A. IDENTITAS

1. Nama :
2. Status : 1) Kawin 2) Duda/ Janda 3) Bujang
3. Akta Nikah : 1) Ada 2) Tidak Ada
4. KTP : 1) Ada 2) Tidak Ada
5. Umur : 1) 16-20 Tahun 2) 21-25 Tahun 3) 26-30 Tahun
4) 31-35 Tahun 5) 36-40 Tahun 4) 41-45 Tahun
5) 46 Keatas
6. Agama : 1) Islam 2) Kristen 3) Katholik
4) Hindu 5) Budha 6) Lain-lain
7. Pendidikan : 1) SI 2) D3 3) SMU/K
4) SLTP/K 5) SD 6) Madrasah
8. Tanggungan Keluarga : 1) 1 Orang 2) 2-4 Orang 3) 5-7 Orang
4) Lebih Dari 7 Orang

No.	Nama	Hubungan Keluarga	Jenis Kelamin (LP)	Tanggal Lahir/usia	Pendidikan			
					SD/ Setingkat	SLTP/ Setingkat	SMU/ Setingkat	Perguruan Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

9. Akta Kelahiran : 1) Ada 2) Tidak Ada
10. Kartu Keluarga (KK) : 1) Ada 2) Tidak Ada

B. ASPEK SOSIOGRAFI**1. Data Rumah/ Bangunan**

- 1) Status Kepemilikan Rumah/ Prkarangan:
- 1) Milik Sendiri 2) Milik Orang Lain
2) Ikut Orang Tua 4) Lain-lain
- 2) Aspek Legalitas Tanah/Rumah :
- 1) Akte 2) Sertifikat
2) Girik 4) Lain-lain
- 3) Luas Perkarangan/Rumah :M2 /M2
- 4) Kondisi Bangunan:
- 1) Bata 2) Semi Permanen
3) Bambu/Kayu 4) Lain-lain

- 5) Kamar Mandi : 1) Dalam Rumah 2) Luar Rumah 3) MCK
 4) Sungai 5) Lain-lain
- 6) Sumber Air Utama :
 1) Sumur gali 2) Sungai
 3) Mata Air 4) Hidran
- 7) Lantai Rumah : 1) Tanah 2) Ubin 3) Semen
 4) Keramik 5) Lain-lain
- 8) Penerangan Rumah :
 1) Sentir/Teplok 2) Listrik
 3) Petromak 4) Lain-lain

2. Data Pekerjaan

- 1) Pekerjaan/Usaha Pokok :
 1) Petani 2) Industri Rumah Tangga
 3) Pedagang 4) Buruh Tani
 5) Buruh Bangunan 6) Buruh Pabrik
- 2) Pekerjaan Sampingan :
 1) Petani 2) Tukang Bangunan
 3) Pedagang 4) Bengkel
- 3) Jika mempunyai pekerjaan sampingan, mengapa :
 1) Tambahan Penghasilan 2) Karena kelebihan Waktu
 3) Meningkatkan Keterampilan 4) Lain-lain

C. DATA BIDANG EKONOMI

- 1) Berapa Luas Lahan yang anda miliki :
 1) 0,5 Ha 2) 1 ha 3) 2 ha 4) lebih 2 ha
- 2) Dari lahan yang sudah diberikan berapa luas yang sudah anda usahakan :
 1) < 0,25 Ha 2) 0,25-0,5 Ha 3) 0,6-1 Ha 4) > 1 Ha
- 3) Aspek legalitas sawah :
 1) Akte 2) Girik 3) Sertifikat 4) Lain-lain
- 4) Jenis Tanaman yang diusahakan :
 1) Padi 2) Palawija 3) Tanaman Keras 4) lain-lain
- 5) Penghasilan per bulan dari pekerjaan pokok dan sampingan :
 1) < Rp. 500.000,- 2) Rp. 500.000 s/d 1 Juta 5) > 2 Juta
 3) 1 Juta s/d 1,5 Juta 4) 1,5 Juta - 2 Juta
- 6) Berapa biaya keluarga yang harus anda keluarkan dalam satu bulan :
 1) < Rp. 500.000,- 2) Rp. 500.000 s/d 1 Juta 5) > 2 Juta
 3) 1 Juta s/d 1,5 Juta 4) 1,5 Juta - 2 Juta
- 7) Jenis paket apa saja yang anda terima selama ini
 1) Paket A 2) Paket B 3) Paket C 4) Semuanya sudah

- 8) Jenis lahan usaha :
- 1) TPLK 2) Pengairan 3) TPLB 4) Tadah Hujan
- 9) Alat-alat pertanian yang digunakan sehari-hari:
- 1) Tradisional 2) Modern 3) Campuran 4) Lain-lain.....
- 10) Pembelian saprotan (bibit, pupuk, obat hama, alat pertanian) didapatkan dari :
- 1) KUD 2) Tengkulak 3) Toko/Pasar 4) lain-lain.....
- 11) Pengolahan hasil panen dilakukan oleh :
- 1) KUD 2) Pabrik 3) Sendiri 4) lain-lain.....
- 12) Pemasaran dan penjualan hasil usaha ke :
- 1) KUD 2) Pabrik 3) Pasar 4) Pedagang Kecil
5) tengkulak 6) Koperasi 7) Lain-lain ...
- 13) Penghasilan perhari :
- 1) < Rp.5000.- 2) Rp. 5000 -s/d Rp. 10.000.- 3) Rp. 10.000 s/d Rp.
4) > 15.000.-
- 14) Sumber Modal Kerja untuk usaha dan pertanian diperoleh dari :
- 1) KUD 2) Bank 3) Usaha sendiri 4) Pengadaian
5) Lain-lain
- 15) Alat-alat pertanian yang digunakan sehari-hari:
- 1) Tradisional 2) Modern 3) Campuran 4) Lain-lain...
- 16) Apakah sudah terbentuk Kelompok tani di desa saudara :
- 1) Sudah 2) Belum 3) Tidak tahu 4) Lain-lain

D. Data Sosial Budaya

- 1) Menurut saudara fasilitas pendidikan yang tersedia :
- 1) Lengkap 2) Tidak Lengkap
- 2) Bagaimana dengan tenaga pengajar dan perlengkapannya :
- 1) Cukup 2) Tidak Cukup
- 3) Bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang tersedia :
- 1) Tersedia 2) Kurang Tersedia
- 4) Apakah petugas Kesehatan tinggal di lokasi :
- 1) Ada 2) Kadang-kadang 3) Tinggal di Luar Lokasi
- 5) Apakah dilokasi saudara sering terjadi wabah penyakit sebutkan
.....
.....
- 6) Apakah pernah dilaksanakan pelatihan - pelatihan untuk warga kalau ada sebutkan
.....
.....
.....

F. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

- 1) Apakah ada tempat pengajian dan dalam bentuk apa kegiatannya sebutkan :
.....
.....
- 2) Bagaimana tanggapan saudara terhadap Pelayanan pemerintahan ?
.....
.....
- 3) Apakah pernah dilaksanakan gotong-royong ? kalau ada dalam bentuk apa ?
.....
.....
- 10) Bagaimana akulturasi budaya/ adat masyarakat asli daerah setempat dan budaya/ adat dari masyarakat pendatang?
.....
.....

G. Integrasi Sosial

- 1) Dari Pengamatan Saudara, apakah saudara setuju dengan adanya warga pendatang yang tinggal di daerah Saudara ?
1) Setuju 2) Tidak Setuju
- 2) Apakah pernah terjadi tindakan kriminalitas antara sesama warga/ penduduk setempat :
.....
.....
- 3) Jika pernah dalam bentuk apa sebutkan :
.....
.....
- 4) Bagaimana akulturasi budaya/ adat masyarakat asli daerah setempat dan budaya/ adat dari masyarakat pendatang?
.....
.....

H. Data Sara dan Prasarana.

- 1) Bagaimana menurut pendapat saudara kondisi jalan poros/desa
1) Sangat Baik 2) Baik 3) Kurang Baik 4) Tidak Tahu
- 2) Bagaimana Menurut pendapat anda kondisi gorong-gorong dan jembatan
1) Sangat baik 2) Baik 3) Tidak Baik 4) lain-lain
- 3) Fasilitas Umum yang dibangun Pemerintah menurut anda bagaimana kondisinya ;
1) Sangat baik 2) Baik 3) Kurang Baik 4) Lain-lain.....

I. Kendala - Kendala Yang dihadapi

1) Di Bidang Sumber daya manusia apa kendala yang di hadapi sebutkan ?

.....
.....
.....

2) Di Bidang sumberdaya fisik Lahan faktor apa saja yang menjadi masalah jelaskan ?

.....
.....
.....

3) Di Bidang Ekonomi apa saja kendala yang ditemui di lapangan sebutkan ?

.....
.....
.....

4) Di Bidang Sosial Budaya Kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan Program Jelaskan ?

.....
.....
.....

5) Di Bagian Integrasi Sosial, Sosial Kemasyarakatan apa saja problema yang dihadapi ?

.....
.....
.....

6) Bagaimana menurut pendapat saudara tentang pelayanan pemerintahan ?

.....
.....
.....

7) Bagaimana menurut pendapat saudara tentang pembinaan mental spiritual ?

.....
.....
.....

8) Apa saran dan pendapat saudara tentang pelaksanaan pembinaan di masa yang akan datang ?

.....
.....
.....

Lampiran III : Indikator dan Parameter Keberhasilan Menurut Dimensi dalam mendukung tingkat Perkembangan Pemukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran.

NO.	DIMENSI	PARAMETER	INDIKATOR
1	EKONOMI	Pendapatan	Pendapatan per KK per Tahun <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 1.000 Kg setara beras - Tingkat Pemanfaatan 2.400 Kg setara beras - Tingkat Pengembangan 3.000 Kg setara beras
		Pemerataan	Gini Rasio <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 0,25 Persen - Tingkat Pengembangan 0.25 Persen
		Ketenagakerjaan	Rasio Setengah Pengangguran <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 10 Persen - Tingkat Pengembangan 10 Persen
		Kontribusi Pemukiman Transmigrasi	Rasio Pendapatan perkapita Transmigran terhadap pendapatan per kapita Kabupaten/ Kota <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0,75 Persen - Tingkat Pemanfaatan 1 Persen - Tingkat Perkembangan 1,1 Persen
		Keberhasilan Koperasi Unit Desa/Tempat Pelayanan Koperasi.	a. Rentabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 0,5 Persen - Tingkat Perkembangan 0 Persen b. Kerjasama Kelompok Tani/KUB <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 30 Persen - Tingkat Pemanfaatan 50 Persen - Tingkat Perkembangan 80 Persen
2	SOSIAL DAN BUDAYA	Kebetahan	Transmigran meninggalkan lokasi <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 8 Persen - Tingkat Pemanfaatan 3 Persen - Tingkat Perkembangan 2 Persen
		Keamanan	Perbuatan tindak kejahatan/pelanggaran <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 3 Persen - Tingkat Perkembangan 2 Persen
		Pendidikan	a. Angka Partisipasi Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 40 Persen - Tingkat Pemanfaatan 50 Persen - Tingkat Perkembangan 80 Persen

NO.	DIMENSI	PARAMETER	INDIKATOR
			b. Angka Melek Huruf <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 40 Persen - Tingkat Pemanfaatan 50 Persen - Tingkat Perkembangan 80 Persen
		Kesehatan dan Keluarga Berencana	a. Prevalensi Penyakit <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 200 Persen - Tingkat Pemanfaatan 150 Persen - Tingkat Perkembangan 80 Persen b. Rasio Kematian Ibu melahirkan dan Balita <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0,5 Persen - Tingkat Pemanfaatan 0,3 Persen - Tingkat Perkembangan 0,10 Persen
		Masyarakat Transmigran	a. Gotong Royong perbaikan fasilitas Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 4 Persen - Tingkat Pemanfaatan 4 Persen - Tingkat Perkembangan 4 Persen b. Kerjasama Kelompok Tani/KUB <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 0,5 Persen - Tingkat Perkembangan 1 Persen
3	INTEGRASIONAL	Tingkat Konflik	SARA <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 5 Persen - Tingkat Pemanfaatan 3 Persen - Tingkat Perkembangan 2 Persen
		Usaha Dagang	Rasio Pedagang Penduduk Lokal dengan Pedagang Transmigran di Pasar <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 10 Persen - Tingkat Perkembangan 20 Persen
4	KEAKTIFAN DAN PELAYANAN LEMBAGA SOSIAL	Keaktifan Lembaga Sosial	a. Tingkat Keaktifan Perangkat Pemerintah Desa <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 0 Persen - Tingkat Pemanfaatan 60 Persen - Tingkat Perkembangan 80 Persen b. Kemampuan Pelayanan aparat pemukiman Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyesuaian 20 Persen - Tingkat Pemanfaatan 10 Persen - Tingkat Perkembangan 5 Persen

Lampiran IV

**Nilai dan Skor Indikator Semua Parameter
Tahun Data : 2010**

Provinsi : Aceh Kabupaten : Aceh Barat Lokasi : Alue Peunyareng SP 6 Tahun Bina : T>=4/ Tahap Pengembangan Pola Trans : Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK)				
Parameter dan Indikator	Target Standar	Nilai Indikator	Skor Nilai	Skor Terbobot
Parameter Ekonomi				
Pendapatan	3.000	2.336	1	23
Gini Rasio	0.25	0.18	1	5
1/2 Pengangguran	10.00	4,25	3	19
Rasio Pendapatan Kab	1,1	0.352	1	6
Rentabilitas	8.00	0.00	1	5
Layanan KUD	80.00	20.19	2	4
Parameter Sosial budaya				
Kebetahan	2.00	1.50	3	41
Tingkat Keamanan	2	0	3	6
Partisipasi Pendidikan	80.00	66.25	2	5
Melek Huruf	80.00	100.00	3	3
Prevalensi Penyakit	100.00	244.40	1	1
Kematian Belita	0.10	0.89	1	1
Rasio Balita & wanita	850.00	511.00	3	3
Gotong Royong	4.00	89.00	1	2
Kerjasama Kel.Tani	100.00	100.00	3	6
Parameter Integrasi Sosial				
Tingkat Konflik SARA	2	0	3	30
Rasio Pedagang	20.00	0.00	1	1
Parameter Kemampuan				
Pelayanan Lembaga Desa				
Keaktifan Perangkat Desa	80.00	101.32	3	13
Pelayanan Aparat Desa	5.00	0.00	2	4
Kesimpulan Penilaian Lokasi				
Target Skor terbobot Maximum	: 300			
Total Skor Terbobot Perhitungan	: 178			
Presentase Skor Terbobot	: 59,33 %			
Kesimpulan Hasil Evaluasi	: Kurang Berkembang			

Keterangan :

- Kurang Berkembang, nilai / skor pengukuran kurang dari 60 %.
- Berkembang, nilai / skor pengukuran 60 - 79 %.
- Cepat Berkembang, nilai / skor pengukuran diatas 80 % .

Lampiran V : Perhitungan Gini Ratio UPT Alue Peunyarling SP-6

Kelompok Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran	Proporsi Jumlah penduduk	% Penduduk (Pi)	% Kumulatif Penduduk (Fp)	Jumlah Pendapatan (C)	% Pendapatan (qi)	% Kumulatif Pendapatan (Qi)	Qi-1	Qi+Qi-1	Pi*(Qi+Qi-1)
<770.000	600000	3	0,03	0,03	1.900.000	0,01357143	0,01357143			
771.000 - 940.000	858333,3333	18	0,18	0,21	17.000.000	0,12142857	0,135	0,013571	0,148571	0,02674286
941.000 - 1.110.000	1014761,905	21	0,21	0,42	22.900.000	0,16357143	0,29857143	0,135	0,433571	0,09105
1.111.000 - 1.280.000	1211764,706	17	0,17	0,59	22.100.000	0,15785714	0,45642857	0,298571	0,755	0,12835
1.281.000 - 1.450.000	1350000	14	0,14	0,73	20.400.000	0,14571429	0,60214286	0,456429	1,058571	0,1482
1.451.000 - 1.620.000	1528750	8	0,08	0,81	13.600.000	0,09714286	0,69928571	0,602143	1,301429	0,10411429
1.621.000 - 1.790.000	1708333,333	6	0,06	0,87	11.400.000	0,08142857	0,78071429	0,699286	1,48	0,0888
1.791.000 - 1.960.000	1831428,571	7	0,07	0,94	14.000.000	0,1	0,88071429	0,780714	1,661429	0,1163
1.961.000 - 2.130.000	2.000.000	1	0,01	0,95	2.500.000	0,01785714	0,89857143	0,880714	1,779286	0,01779286
2.131.000 - 2.300.000	2200000	2	0,02	0,97	5.000.000	0,03571429	0,93428571	0,898571	1,832857	0,03665714
2.301.000 - 2.470.000	2.500.000	1	0,01	0,98	3.200.000	0,02285714	0,95714286	0,934286	1,891429	0,01891429
>2.471.000	2500000	2	0,02	1	6.000.000	0,04285714	1	0,957143	1,957143	0,03914286
Seluruh Penduduk	1272600				140.000.000					0,81606429

NO	KELOMPOK MASALAH	URAIAN MASALAH / KENDALA	PERINGKAT
1	Sumber Daya Fisik Alam	<p>a Jenis tanah UPT ini didominasi oleh Jenis Tanah Gleisol Histik, Kambisol Distik dengan tingkat kesuburan tanah rendah sampai sedang, tingkat keasaman tinggi pH 4,4-5,5.</p> <p>b Adanya hama babi yang sulit dikendalikan.</p> <p>c LUI pada musim hujan tergenang air dikarena sistem drainase yang kurang baik.</p> <p>d LU II belum dibuka, masih berupa hutan dan semak belukar.</p> <p>e LP 0,1 Ha/KK, sudah dibagi, sertifikat sudah ada tetapi belum dibagikan ke warga.</p> <p>f LU I 0,9 Ha/KK, sudah dibagi, sertifikat masih dalam proses dan belum dibagikan kepada warga.</p> <p>g LU II i/KK belum dibuka seluas 139 Ha dalam proses (persil) 61 Ha masih dalam sengketa (dengan masyarakat sekitar).</p>	<p>1b</p> <p>1a</p> <p>1c</p> <p>1d</p> <p>1e</p> <p>1f</p> <p>1g</p>
2	Sarana dan Prasarana	<p>a Kondisi jalan penghubung 4,5 Km dalam dalam bentuk body jalan (jalan Tanah)</p> <p>b Satu jembatan konstruksi kayu dijalan poros panjang 5 m, kondisi lantainya rusak.</p> <p>c Gorong-gorong sebanyak 4 unit</p> <p>d Sumber air bersih berasal dari 50 sumur gali dan dua buah sumur bor semuanya berfungsi dan digunakan oleh 4 KK/unit, dari hasil PRA, para transmigran memerlukan penambahan sumur gali, selain dari sumur gali, sumber air bersih juga dari air hujan.</p> <p>e Balai Desa kondisinya rusak dan perlu direnovasi</p>	<p>2b</p> <p>2c</p> <p>2d</p> <p>2a</p> <p>2e</p>
3	Sosial Budaya	<p>a Kurang memadainya jumlah peralatan dan perlengkapan pendidikan, saat ini dibutuhkan perlengkapan pendidikan kursi 30 unit, meja 30 unit lemari 2 unit, meja dan kursi guru 6 unit.</p> <p>b Dibutuhkan honor bagi tenaga pengajar untuk tingkat TK (TPA).</p> <p>c Dibutuhkan permainan anak dan kelengkapan peralatan belajar mengajar.</p>	<p>3b</p> <p>3a</p> <p>3c</p>
4	Perekonomian dan Pertanian	<p>a Terbatasnya modal untuk usaha tani (pengadaan pupuk dan bibit tanaman), dan bantuan dari pemerintah pada tahap awal penempatan sangat kurang memandaibegitu juga dalam pemasarannya yang saat ini dijual melalui tengkulak.</p>	<p>4a</p>
5	Kelembagaan	<p>a Kondisi KUD saat ini masih aktif tetapi hanya bergerak dalam bidang penupukan saja karena terbatasnya modal dan kurangnya pembinaan dari dinas-dinas terkait.</p> <p>b Kelompok tani sudah ada tetapi tidak begitu aktif.</p>	<p>5a</p> <p>5b</p>
6	Integrasi Sosial	<p>a Adanya keinginan masyarakat setempat dan kebijakan Pemda Kabupaten Aceh Barat untuk menempatan kembali transmigran dari luar Aceh.</p>	<p>6a</p>

**KEPUTUSAN
MENTERI TRANSMIGRASI
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP. 06/MEN/1999

TENTANG

**TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRASI**

MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN

Menimbang :

1. Bahwa Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.269/MEN/1984 tentang Kriteria Tingkat Perkembangan Minimal Unit Pemukiman Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Penyelenggaraan Transmigrasi, maka perlu di tinjau kembali.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan penyelenggaraan transmigrasi perlu adanya pengaturan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 122/M Tahun 1998 tentang pembentukan Kabinet reformasi Pembangunan.
4. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia nomor. KEP.64/MEN/1986 tentang tata cara penyusunan Peraturan Perundangan di Lingkungan departemen Transmigrasi.
5. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP.124/MEN/1990 tentang pola pemukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia nomor. KEP.122/MEN/1997
6. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor. KEP.17A/MEN/1995 tentang rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi (SIM-TRANS) REPELITA VI.
7. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan republik Indonesia Nomor KEP. 150/MEN/1995 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan jis Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 155/MEN/1996 tentang organisasi dan tata kerja Balai Latihan Kerja Transmigrasi dan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 124/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Transmigrasi.
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. KEP. 195/KET/12/1996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan.
9. Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia . Nomor SKB.11/MEN/1997 18 Tahun 1997
Tentang Pembentukan, Pembinaan dan penyerahan desa transmigrasi
10. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 66/MEN/1997 tentang Sistem Pelaporan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Memperhatikan :

Instruksi Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor. JNS. 81/MEN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. SKB. 11/MEN/1997 18 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Pembinaan, dan Penyerahan Desa transmigrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tingkat Penyesuaian adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya sedang beradaptasi di lingkungan baru (sosial ekonomi, budaya dan fisik) untuk mampu melaksanakan kehidupan di lokasi baru.
- b. Tingkat Pemantapan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah berkemampuan mengelola asset produksi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Tingkat Pengembangan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan.
- d. Evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi adalah bagian dari kegiatan manajemen kegiatan pembangunan transmigrasi yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak pembangunan transmigrasi yang telah di rencanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan transmigrasi.
- e. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan
- f. Prevalensi Penyakit adalah ukuran penyebaran penyakit pada masyarakat dalam satu satuan wilayah dalam satu tahun

Pasal 2

1. Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran meliputi tingkat penyesuaian, pemantapan dan pengembangan
2. Tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan matrik tata cara penghitungan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
3. Matrik tata cara Perhitungan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi meliputi:
 - Ekonomi
 - Sosial dan Budaya
 - Integrasional
 - Keaktifan dan Pelayanan lembaga Sosial
4. Input data yang di gunakan untuk penghitungan tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh pada permukiman transmigrasi.

Pasal 3

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir laporan UPT tahunan dan formulir laporan kesejahteraan transmigran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor. KEP. 66/MEN/1997.

Pasal 4

1. Kepala kantor Kantor Unit Permukiman transmigrasi bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyampaikan data perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran yang disusun dalam suatu laporan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris jenderal c.q. Pusat data dan Informasi.
2. Laporan atas pelaksanaan sebagaimana di maksud kegiatan pada ayat (1) di ketahui/disetujui oleh Kepala Kantor Departemen/Dinas Transmigrasi dan Kepala Kantor Wilayah.
3. Sekretariat jenderal bertanggung jawab untuk membina dan mengkoordinir pengumpulan data dan pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran

Pasal 5

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilaksanakan mulai 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan anggaran sampai akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Hasil pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran di gunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi.
2. Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta penetapan kebijaksanaan pembangunan transmigrasi.
3. Hasil evaluasi kinerja di keluarkan pada akhir tahun anggaran

Pasal 7

hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penilaian tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan

transmigrasi di atur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.

Pasal 8

1. Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP.269/MEN/1984 tentang Kriteria Tingkat Perkembangan Minimal Unit Permukiman Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP.269/MEN/1984 tentang Kriteria Tingkat Perkembangan Minimal Unit Permukiman Transmigrasi masih diberlakukan sebagai dasar penilaian tingkat perkembangan permukiman transmigrasi selama Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 belum di keluarkan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 4 - 2 - 1999

MENTERI TRANSMIGRASI

DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA

A.M. HENDROPRIYONO

Universitas Terbuka